

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Geografi

Kabupaten Wonosobo terletak di Provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak pada 7⁰.43'.13" dan 7⁰.04'.40" garis Lintang Selatan (LS) serta 109⁰.43'.19" dan 110⁰.04'.40" garis Bujur Timur (BT), dengan luas 98.468 ha (984,68 km²) atau 3,03 % luas Jawa Tengah. Jarak ibukota Kabupaten Wonosobo ke ibukota Provinsi Jawa Tengah berjarak 120 km dan dari ibukota negara (Jakarta) berjarak 520 km. Posisi spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di antara Jalur Pantai Utara dan Jalur Pantai Selatan. Selain itu menjadi bagian terpenting dari jaringan Jalan Nasional ruas jalan Buntu-Pringsurat yang memberi akses dari dan menuju dua jalur strategis nasional tersebut.

Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Dilihat dari aspek topografi, Kabupaten Wonosobo bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu, daerah dengan ketinggian 250–500 m dpl seluas 33,33% dari seluruh wilayah. Daerah dengan ketinggian 500–1.000 m dpl seluas 50,00% dari seluruh areal dan daerah dengan ketinggian > 1.000 m dpl seluas 16,67% dari seluruh wilayah, sehingga menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wajah Kabupaten. Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda menyebabkan tanah di Wonosobo termasuk subur. Hal ini sangat mendukung pengembangan pertanian, sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. Komposisi tata guna lahan terdiri atas tanah sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99 %), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99 %), hutan negara 18.909,72 ha (19.20 %), perkebunan negara/swasta 2.764,51 ha (2,80 %) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01 %). Namun demikian karena topografinya dengan lembah yang masih curam menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor.

Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Suhu udara rata-rata 24 – 30° C di siang hari, turun menjadi 20 ° C pada malam hari. Pada bulan Juli – Agustus turun menjadi 12 – 15 ° C pada malam hari dan 15 – 20 ° C di siang hari. Rata-rata hari hujan adalah 196 hari, dengan curah hujan rata-rata 3.400 mm, tertinggi di Kecamatan Garung (4.802 mm) dan terendah di Kecamatan Watumalang (1.554 mm).

Berdasarkan kajian Tata Ruang Kabupaten Wonosobo sistem perdesaan yang dikembangkan sebagai kawasan Agropolitan adalah Kawasan Rojonoto, yang meliputi Kecamatan Kaliwiro, Sukoharjo, Leksono, dan Selomerto. Pada Kawasan Agropolitan Rojonoto terdapat kota tani utama yaitu Kota Tani Sawangan serta 4 Kota Tani lainnya yaitu Kota Tani Sukoharjo, Kota Tani Tlogo, Kota Tani Selomerto dan Kota Tani Kaliwiro. Sistem Pusat Pelayanan terdiri dari :

- PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang mencakup wilayah Kecamatan Wonosobo
- PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi) yang mencakup wilayah Kecamatan Kertek dan Selomerto
- PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang mencakup wilayah Kecamatan Mojotengah, Kejajar dan Sapuran
- PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang mencakup wilayah Kecamatan Kepil, Kaliwiro, Wadaslintang, Leksono, Kalikajar, Garung, Watumalang, Sukoharjo dan Kalibawang.

Berdasarkan pola ruang wilayah dibagi menjadi 2 (dua) besar yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi melindungikelestarian lingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Mengingat posisi geografis Kabupaten Wonosobo yang berada di wilayah atas maka Kawasan lindung ini hampir meliputi seluruh wilayah. Kawasan ini terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Lindung
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya.
- c. Kawasan perlindungan setempat.
- d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
- e. Kawasan rawan bencana alam, dan
- f. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah.

Sedangkan Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi:

- a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Kawasan Budidaya hutan produksi terdapat di Kecamatan Kaliwiro, Leksono, Watumalang, Sukoharjo, Sapuran, Kalibawang, Wadaslintang dan Kepil.
- b. Kawasan Peruntukan Pertanian yang terdiri dari :
 - 1). Kawasan pertanian lahan basah dikembangkan di semua kecamatan kecuali Kecamatan Kejajar

- 2). Kawasan pertanian lahan kering dikembangkan pada daerah yang tidak terjangkau jaringan irigasi, bukan hutan lindung atau kemiringan lereng kurang dari 40 % dan terdapat pada semua kecamatan pada lahan yang sesuai.
- c. Kawasan Peruntukan Perkebunan terdapat pada semua wilayah kecamatan sesuai dengan komoditas yang berkembang di kabupaten Wonosobo.
- d. Kawasan Peruntukan Perikanan diprioritaskan dikembangkan di semua kecamatan di daerah yang tersedia pasokan air yang cukup.
- e. Kawasan Peruntukan Peternakan, yang terdiri dari :
 - 1). Kawasan peternakan ternak besar diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Wadaslintang, Kepil, Leksono, Kalikajar, Sapuran, Kaliwiro, Kalibawang, Sukoharjo, Kertek, Selomerto, Watumalang, Wonosobo dan Mojotengah.
 - 2). Kawasan Peternakan unggas di Kecamatan Kejajar, Kalikajar, Garung, Mojotengah, Watumalang, Wadaslintang, Kalibawang, Kaliwiro, Leksono, Sukoharjo, Wonosobo, Kepil, Sapuran, Kertek dan Selomerto.
- f. Kawasan Peruntukan Pertambangan dikembangkan pada kawasan yang potensial bahan tambang namun bukan pada Kawasan Lindung, yang dikelola secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dalam eksploitasinya.
- g. Kawasan Peruntukan Pemukiman sebagaimana dikembangkan di daerah yang datar, bukan lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, aksesibilitas baik dan tersedia air bersih.
- h. Kawasan Peruntukan Industri, untuk industri menengah dan besar dikembangkan di sepanjang jalur regional Temanggung-Wonosobo-Banjarnegara yang mencakup wilayah Kertek, Wonosobo dan Selomerto serta Jalur Kertek-Sapuran-Kepil dengan lokasi di Kecamatan Sapuran. Sedangkan sentra-sentra industri kecil dan Industri Rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan.
- i. Kawasan peruntukan pariwisata diarahkan pada kawasan sebagai berikut :
 - 1). Kawasan Wisata Alam;
 - 2). Kawasan Wisata Budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan;
 - 3). Kawasan Wisata Religius terdapat di Kecamatan Kaliwiro, Selomerto dan Kejajar;
 - 4). Kawasan Wisata Buatan terdapat di Kecamatan Kejajar, Wonosobo dan Wadaslintang;
 - 5). Kawasan Wisata Tradisi terdapat di Kecamatan Kejajar, Selomerto, Kertek, Garung, Kalikajar, Wonosobo;
 - 6). Kawasan Wisata sejarah di Kecamatan Wonosobo;
 - 7). Kawasan wisata minat khusus terdapat di Kecamatan Selomerto dan Kejajar.

Sedangkan potensi terjadinya bencana alam, Kabupaten Wonosobo termasuk daerah yang memiliki kelas kerawanan bencana yang tinggi. Dari hasil

analisa dan kajian geologi, hidrogeologi, vulkanologi dan kondisi bentang alam wilayah, Kabupaten Wonosobo mempunyai kawasan rawan bencana alam, yaitu :

- a. kawasan rawan tanah longsor, terdapat di Kecamatan Kepil, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Wadaslintang dan Kecamatan Kalibawang;
- b. kawasan rawan angin topan, terdapat di Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar dan Kecamatan Watumalang;
- c. kawasan rawan kebakaran hutan, terdapat di Kecamatan Kejajar, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kepil;
- d. kawasan rawan bencana gas beracun, terdapat di Kecamatan Kejajar; dan
- e. kawasan rawan bencana letusan gunung api, yang terdapat di Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kepil.

2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 menurut proyeksi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo sebanyak 777.116 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 393.968 jiwa dan perempuan 383.148 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan sebanyak 3.836 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2014 yang sebanyak 773.280 jiwa. Jika jumlah penduduk tersebut dirinci menurut sebaran wilayah, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk dirinci per Wilayah Kecamatan Tahun 2014-2015

No.	Kecamatan	2014			2015		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Wadaslintang	25.718	26.319	52.037	25.770	26.372	52.142
2	Kepil	28.437	28.440	56.877	28.495	28.497	56.992
3	Sapuran	28.020	27.453	55.473	28.198	27.626	55.824
4	Kalibawang	11.343	11.199	22.542	11.366	11.222	22.588
5	Kaliwiro	22.266	22.255	44.521	22.311	22.300	44.611
6	Leksono	20.467	19.842	40.309	20.593	19.963	40.556
7	Sukoharjo	16.636	15.694	32.330	16.762	15.812	32.574
8	Selomerto	23.483	22.718	46.201	23.632	22.862	46.494
9	Kalikajar	29.418	28.765	58.183	29.478	28.824	58.302
10	Kertek	39.949	38.489	78.438	40.171	38.703	78.874
11	Wonosobo	43.441	42.701	86.142	43.862	43.115	86.977
12	Watumalang	25.097	24.069	49.166	25.148	24.118	49.266
13	Mojotengah	31.047	28.926	59.973	31.252	29.116	60.368
14	Garung	25.122	23.812	48.934	25.223	23.908	49.131
15	Kejajar	21.573	20.581	42.154	21.707	20.710	42.417
	Jumlah	392.017	381.263	773.280	393.968	383.148	777.116

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2015

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo secara alami dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. PDRB

PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah/region. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu besarnya PDRB yang mampu dihasilkan sangat tergantung pada faktor tersebut. Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan PDRB bervariasi antar daerah. Dari sini dapat dilihat besaran nilai tambah dari masing-masing sektor ekonomi. Selain itu dapat dilihat sektor-sektor yang berperan dalam pembentukan perekonomian daerah.

Selama empat tahun terakhir, PDRB Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan gambaran tentang kinerja ekonomi makro di Kabupaten Wonosobo dari waktu ke waktu yang terus membaik. . Pada tabel 2.2 dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 sebesar 10.893.446,2 juta rupiah mengalami kenaikan 8,45 persen dari tahun 2011 dengan nilai sebesar 10.045.107,9 juta rupiah. Dan pada tahun 2013 meningkat 10,45 persen yaitu dengan nilai sebesar 12.031.337,7 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 10,82 persen dengan nilai sebesar 13.333.270,5 dari tahun 2013.

Pendekatan yang lebih lazim untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah didekati dengan cara membandingkan angka PDRB pada suatu wilayah dan dibandingkan antar tahun yang dihitung atas dasar harga konstan. Seperti terlihat pada tabel 2.3, nilai PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga konstan pada tahun 2014 sebesar 10.892.939,1 juta rupiah mengalami peningkatan sebesar 14,09 persen dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 10.457.818,0 juta rupiah.

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo
Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2011 – 2014

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.507.330,3	3.740.261,6	4.164.680,6	4.481.7,5
2	Pertambangan dan Penggalian	99.019,6	102.249,3	109.516,0	130.731,5
3	Industri Pengolahan	1.673.139,5	1.832.247,3	1.974.569,7	2.226.545,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.582,6	3.853,4	3.980,2	4.147,0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.869,3	13.043,1	13.745,9	15.146,0
6	Konstruksi	589.378,3	654.249,9	712.641,0	814.143,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.790.433,2	1.873.949,5	2.032.311,9	2.194.016,4
8	Transportasi dan Pergudangan	473.289,0	508.514,1	559.877,6	658.701,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	296.925,6	333.365,7	376.504,0	428.914,4
10	Informasi dan Komunikasi	109.505,1	118.629,6	126.730,3	136.464,7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	276.164,5	314.367,9	353.154,4	411.251,4
12	Real Estate	150.017,8	159.396,1	177.814,8	205.972,4
13	Jasa Perusahaan	19.990,2	21.842,0	25.375,6	28.369,0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	266.829,5	297.262,8	321.057,9	347.224,4
15	Jasa Pendidikan	467.842,9	589.278,9	700.220,2	810.307,7
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	104.309,0	125.576,1	143.806,2	167.070,2
17	Jasa Lainnya	204.481,4	205.358,8	235.351,4	272.478,9
	PDRB	10.045.107,9	10.893.446,2	12.031.337,7	13.333.270,5

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2015

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo
Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah), 2011 – 2014

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.301.681,8	3.406.757,0	3.503.177,0	3.486.208,6
2	Pertambangan dan Penggalian	93.342,4	96.128,8	99.758,5	108.821,6
3	Industri Pengolahan	1.537.632,4	1.621.383,2	1.712.942,2	1.785.785,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.549,6	3.899,8	4.192,4	4.359,4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.771,0	12.864,9	13.376,8	14.386,7
6	Konstruksi	561.767,5	601.526,9	637.351,2	671.148,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.716.251,0	1.766.536,7	1.862.820,6	1.958.338,2
8	Transportasi dan Pergudangan	472.695,2	506.975,2	553.527,6	609.050,4

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	282.782,3	302.170,5	318.665,1	342.229,6
10	Informasi dan Komunikasi	108.053,1	119.768,0	130.688,8	146.518,3
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	260.533,2	272.561,7	292.689,4	324.080,2
12	Real Estate	147.395,7	155.184,7	171.608,8	188.900,8
13	Jasa Perusahaan	18.730,9	19.838,0	22.188,0	24.182,8
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	262.178,0	264.073,5	272.266,1	275.826,2
15	Jasa Pendidikan	414.690,9	478.709,9	524.196,7	581.432,8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	97.209,8	108.512,3	117.809,1	131.542,6
17	Jasa Lainnya	198.285,7	199.014,8	220.559,8	240.127,6
	PDRB	9.489.550,5	9.935.905,3	10.457.818,0	10.892.939,1

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2015

Peranan atau kontribusi sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya. Apabila struktur ekonomi ini disajikan dari waktu ke waktu maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran struktur ekonomi ini sering dipakai sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan. Misalnya adanya penurunan peran sektor pertanian diikuti dengan kenaikan sektor industri.

Peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2014, peranan lapamham usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih sangat dominan dengan menduduki peringkat tertinggi yaitu sebesar 33,6 persen, kemudian disusul oleh lapangan usaha industry pengolahan sebesar 16,70 persen serta perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,46 persen.

Tabel 2.4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (persen) Tahun 2011–2014

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,9	34,3	34,6	33,6
2	Pertambangan dan Penggalan	0,99	0,94	0,91	0,98
3	Industri Pengolahan	16,66	16,82	16,41	16,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,12	0,11	0,11

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
6	Konstruksi	5,87	6,01	5,92	6,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,82	17,20	16,89	16,46
8	Transportasi dan Pergudangan	4,71	4,67	4,65	4,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,96	3,06	3,13	3,22
10	Informasi dan Komunikasi	1,09	1,09	1,05	1,02
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,75	2,89	2,94	3,08
12	Real Estate	1,49	1,46	1,48	1,54
13	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,21	0,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,66	2,73	2,67	2,60
15	Jasa Pendidikan	4,66	5,41	5,82	6,08
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	1,04	1,15	1,20	1,25
17	Jasa Lainnya	2,04	1,89	1,96	2,04
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2015

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Data tersebut diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap lebih merata). Indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita
Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah), 2011 – 2014

No	Tahun	PDRB Perkapita
1.	2011	13.203.856,4
2.	2012	14.236.281,2
3.	2013	15.638.965,5
4.	2014	17.242.487,2

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2015

Tingkat rata-rata kesejahteraan penduduk Kabupaten Wonosobo cukup tinggi, dengan PDRB perkapita sekitar 17,2 juta rupiah pada tahun 2014, tumbuh sebesar 10,25 persen dari PDRB perkapita pada tahun 2013 yaitu sebesar 15,6 juta rupiah. Dilihat dari data yang ada setiap tahun PDRB perkapita di Kabupaten Wonosobo terus meningkat.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya. Untuk melihat fluktuasi perekonomian tersebut secara riil, maka perlu disajikan PDRB atas dasar harga konstan secara berkala.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 sebesar 4,16 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan tahun 2012 yang masing-masing sebesar 5,25 persen dan 4,70 persen.

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Konstan (persen),
2011 – 2014

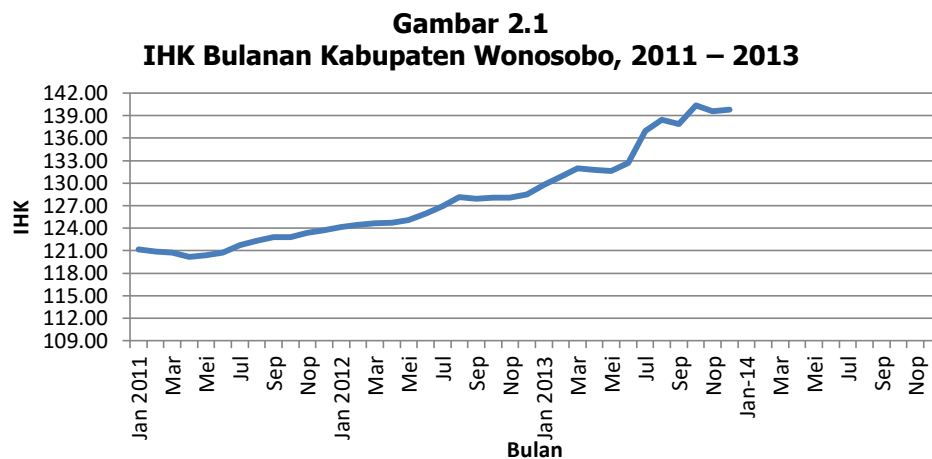
No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,17	3,18	2,83	-0,48
2	Pertambangan dan Penggalian	3,28	2,99	3,78	9,09
3	Industri Pengolahan	5,84	5,65	5,65	4,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,83	7,50	7,50	3,98
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,45	3,98	3,98	7,55
6	Konstruksi	2,11	5,96	5,96	5,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,28	5,45	5,45	5,13
8	Transportasi dan Pergudangan	5,05	9,18	9,18	10,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,41	5,46	5,46	7,39
10	Informasi dan Komunikasi	11,27	9,12	9,12	12,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,89	7,38	7,38	10,72
12	Real Estate	4,41	10,58	10,58	10,08
13	Jasa Perusahaan	7,35	11,85	11,85	8,99
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,35	3,10	3,10	1,31
15	Jasa Pendidikan	15,67	9,50	9,50	10,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	10,05	8,57	8,57	11,66
17	Jasa Lainnya	2,36	10,83	10,83	8,87
	Laju pertumbuhan (%)	5,37	4,70	5,25	4,16

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2015

c. Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen atau masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan, pada suatu periode waktu dengan periode waktu tertentu yang telah ditetapkan. IHK secara universal digunakan sebagai indikator umum inflasi. Inflasi adalah angka yang menggambarkan perubahan (dalam persen) IHK yang terjadi pada suatu periode waktu dengan periode waktu sebelumnya.

Pada prinsipnya, semua komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat masuk dalam paket komoditas. Mengingat begitu banyak jenis dan ragamnya, maka dilakukan pemilihan komoditas-komoditas yang masuk dalam paket komoditas, dengan beberapa pertimbangan, antara lain komoditas tersebut dominan dikonsumsi oleh masyarakat, mewakili komoditas sejenis dalam kategori yang sama, spesifikasi harganya dapat dirinci dengan jelas serta harga dari komoditas tersebut dapat dipantau secara terus menerus. Secara umum, komoditas yang masuk dalam paket terdiri dari tujuh kelompok pengeluaran yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan; air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; transportasi, komunikasi; dan jasa keuangan.



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016 Kabupaten Wonosobo

Perkembangan IHK bulanan Kabupaten Wonosobo mengalami kecenderungan naik. Selama tahun 2011 – 2014, hanya di beberapa bulan saja IHK mengalami penurunan atau inflasi bernilai negatif.

Tabel 2.7
Inflasi Bulanan Kabupaten Wonosobo, 2014

Bulan	Inflasi
Januari	1,38
Februari	0,03
Maret	-0,08
April	0,23
Mei	0,04
Juni	0,43
Juli	0,79
Agustus	0,50
September	0,34
Oktober	0,52
November	1,43
Desember	2,55

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2015

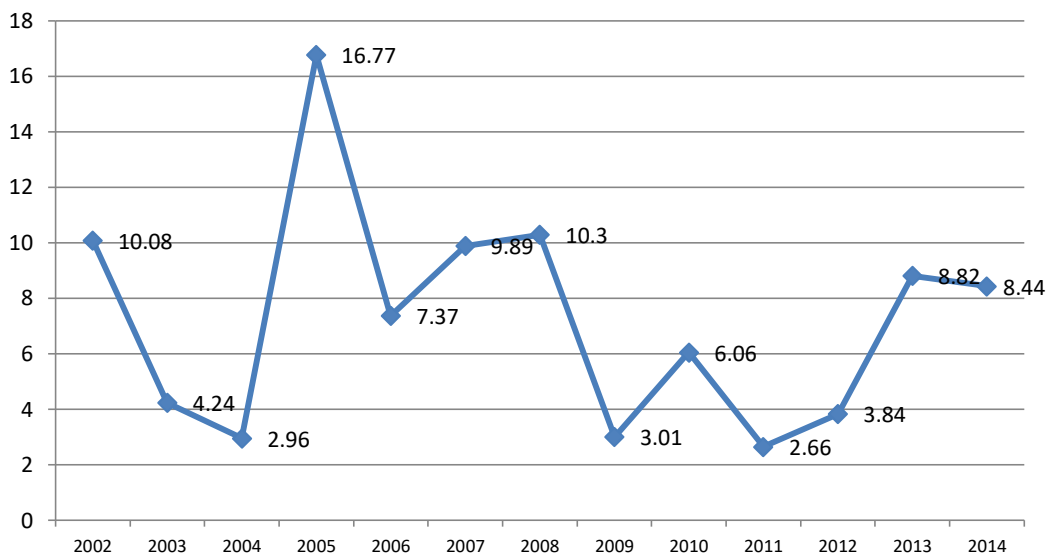
Dari tabel 2.7, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, inflasi mengalami kecenderungan adanya fluktuasi nilai dari bulan Januari hingga desember. Dan hanya terjadi sekali deflasi yaitu pada bulan Maret sebesar 0,08 persen. Kemudian pada April 2014 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,23 persen, pada Juli 2014 juga terjadi peningkatan yaitu menjadi sebesar 0,79 persen. Pada kurun waktu September – Desember 2014 cenderung mengalami peningkatan inflasi. Pada bulan November dan Desember 2014 inflasi meningkat cukup tajam dan peningkatan inflasi paling tajam terjadi pada bulan Desember 2014 yaitu terjadi peningkatan sebesar 1,12 persen dari bulan November. Kecenderungan naiknya angka inflasi tersebut dapat dimungkinkan karena adanya libur panjang semester sekolah serta masuk tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah dan adanya peringatan Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang membuat masyarakat menjadi konsumtif yang berujung pada kenaikan angka inflasi pada bulan desember yang cukup tajam. Selain itu juga dapat dimungkinkan karena menjelang datangnya bulan Ramadhan tahun ini yang jatuh pada bulan Juli. Pada bulan Ramadhan konsumsi masyarakat pada umumnya cenderung meningkat, yang pada akhirnya mengakibatkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.

Selama tahun 2014, secara umum, penyumbang terbesar dari kenaikan maupun penurunan angka inflasi adalah dari kelompok bahan makanan. Sedangkan penyumbang terkecil adalah kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga. Pada bulan Desember, dimana terjadi inflasi terbesar pertama dalam setahun, penyumbang terbesarnya adalah dari kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Besarnya andil kedua kelompok pengeluaran tersebut dikarenakan

karena bertepatan dengan Hari Raya Natal dan Tahun Baru serta adanya tahun ajaran baru bagi anak sekolah yang mana konsumsi masyarakat meningkat. Komoditi penyumbang terbesar adalah harga bawang merah yang meroket tajam.

Gambar 2.2

Inflasi Kabupaten Wonosobo, 2002-2014



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016

Selama tahun 2002 - 2014, angka inflasi bernilai cukup tinggi pada tahun 2002, 2005, 2008, 2010, 2013 dan 2014. Angka inflasi yang tinggi berarti kenaikan harga yang tinggi pula. Tingginya angka inflasi pada tahun 2002 dikarenakan masih adanya efek dari kejadian reformasi yang terjadi di Indonesia secara umum pada tahun 1998 yang hingga mengakibatkan angka inflasi nasional mencapai 77,63 persen. Tingginya angka inflasi pada tahun 2005, 2008, 2013 dan 2014 dimungkinkan karena pada tahun tersebut pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan bahan bakar minyak secara multiplier (berantai) akan mengakibatkan kenaikan harga di hampir seluruh kelompok barang dan jasa.

d. Koefisien Gini

Salah satu data yang sangat penting dan berguna dalam rangka perencanaan pembangunan tersebut adalah Gini Rasio (Koefisien Gini) yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk, Distribusi Pendapatan menurut kriteria Bank Dunia (*World Bank Criteria*) dan Indeks Williamson yang mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah (antar kecamatan). Kebutuhan data sosial ekonomi, khususnya mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat perlu dipenuhi untuk mengetahui apakah

hasil-hasil pembangunan telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Tabel 2.8

**Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Wonosobo
Menurut Nilai Gini Rasio , 2010 – 2013**

TAHUN	GINI RASIO
2010	0,2494
2011	0,3461
2012	0,3782
2013	0,3400
2014	0,3400

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016Kabupaten Wonosobo

Secara umum tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Wonosobo masih tergolong pada kriteria rendah, atau dengan kata lain pembagian pendapatan yang diterima penduduk cukup merata. Hal ini tergambarkan dari GR Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 sebesar 0,3400. Nilai indeks tersebut tidak mengalami perubahan dari nilai indeks tahun 2013 sebesar 0,3400. Dari Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2010, angka Indeks Gini Kabupaten Wonosobo berada pada kriteria ketimpangan rendah ($<0,35$) kecuali pada tahun 2012. Pelaksanaan otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah lebih terfokus dalam menentukan arah pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Wonosobo yang telah dan sedang dilaksanakan telah berada pada jalur yang cukup baik.

e. Kriteria Ketimpangan Pendapatan Bank Dunia

Ukuran ketimpangan pendapatan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia membagi penduduk menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah antara 12 persen sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah.

- c. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

Tabel 2.9.
Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Wonosobo
Menurut Kriteria Bank Dunia, 2010 – 2013

Tahun	Kriteria Bank Dunia		
	40% I	40% II	20% III
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	25,33	39,40	35,27
2011	18,71	33,36	47,93
2012	17,15	29,69	53,16
2013	20,09	36,19	43,72

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016

Pada tabel 2.9 disajikan distribusi pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia pada tahun 2013 menurut total penduduk. Pada total penduduk, terlihat bahwa kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah (masyarakat lapis bawah) menyerap sebanyak 20,09 persen dari total pendapatan, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan menengah mendapat 36,19 persen dan kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi mendapat 43,72 persen. Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di Wonosobo tahun 2013 relatif cukup merata, artinya persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan rendah telah lebih besar dari 17%.

f. Kesenjangan Antar Wilayah Kecamatan (Indeks Williamson)

Ukuran ketimpangan pendapatan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antar wilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Kesenjangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Wonosobo dapat dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson.

Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi antar kecamatan yang berbeda akan menyebabkan produktivitas wilayah dalam menghasilkan nilai tambah yang berbeda.

Akselerasi perkembangan wilayah pun akan berbeda pula. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antar wilayah, yang tercermin dari perbedaan nilai PDRB per kapita kecamatan. Tabel 2.10 menunjukkan tingkat kesenjangan antar wilayah kecamatan, yang ditinjau dari sisi nilai Indeks

Williamson, yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

Tabel 2.10
Indeks Williamson Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 -2012

TAHUN	PDRB ADHBERLAKU	PDRB ADH KONSTAN
2010	0,1707	0,1741
2011	0,2182	0,1893
2012	0,2921	0,2115

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016 Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan PDRB kecamatan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan sesuai Tabel 2.10 dapat diketahui bahwa kondisi kesenjangan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Wonosobo relatif rendah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson yang mendekati nol. Dapat diketahui pula adanya pergeseran tingkat kesenjangan wilayah dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Ada kecenderungan bahwa tingkat kesenjangan antar kecamatan semakin besar. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Williamson tahun 2012 untuk harga konstan yang cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini memerlukan perhatian lebih serius agar kesenjangan antar kecamatan tidak semakin tinggi.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru. Tahun 2011 dan 2014 dilakukan metodologi (IPM Metode Baru). Perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan. IPM tahun 2014 sebesar 65,20 meningkat 0,63 point atau 0,98 % jika dibanding tahun 2013 sebesar 64,57. Mengacu pada tabel 2.11 jika dibandingkan antara komponen pembentuk angka IPM menunjukan bahwa pertumbuhan rata-rata komponen belum begitu signifikan hal ini menunjukan masih perlu dilakukan akselerasi pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2.11
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonosobo, 2011 - 2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,37	70,50	70,63	70,76	70,82
Harapan lama Sekolah (tahun)	9,96	10,09	10,83	11,03	11,34
Rata-rata lama sekolah (tahun)	5,81	5,87	5,90	5,92	6,07
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah PPP)	9.032	9.275	9.404	9.458	9.491
IPM	62,50	63,07	64,18	64,57	65,20

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016

Berdasarkan tabel diatas jika dibandingkan antara komponen pembentuk angka IPM menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata tertinggi adalah komponen rata-rata lama sekolah (tahun) sebesar 1,100 % dan terendah adalah komponen Angka Harapan Hidup (tahun) sebesar 0,16%, hal ini menunjukkan bahwa bidang Angka Harapan Hidup (tahun) perlu dilakukan akselerasi pembangunan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-eksKaresidenan Kedu, IPM Kabupaten Wonosobo selalu berada pada peringkat paling bawah di setiap tahunnya. Hal ini menjadi indikasi sederhana bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo masih di bawah kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kedu. Berikut disajikan perkembangan IPM kabupaten/Kota di wilayah eks Karesidenan Kedu 2010-2014.

Tabel 2.12.
IPM Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu, 2010-2014

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	Peringkat	
						Jateng	Eks Kedu
Kota Magelang	73,99	74,47	75,00	75,29	75,79	4	1
Kab. Magelang	63,28	64,16	64,75	65,86	66,35	25	3
Kab. Purworejo	86,16	69,11	69,40	69,77	70,12	14	2
Kab. Kebumen	63,08	64,05	64,47	64,86	65,67	29	5
Kab. Temanggung	63,08	64,14	64,91	65,52	65,97	27	4
Kab. Wonosobo	62,50	63,07	64,18	64,57	65,20	30	6

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016

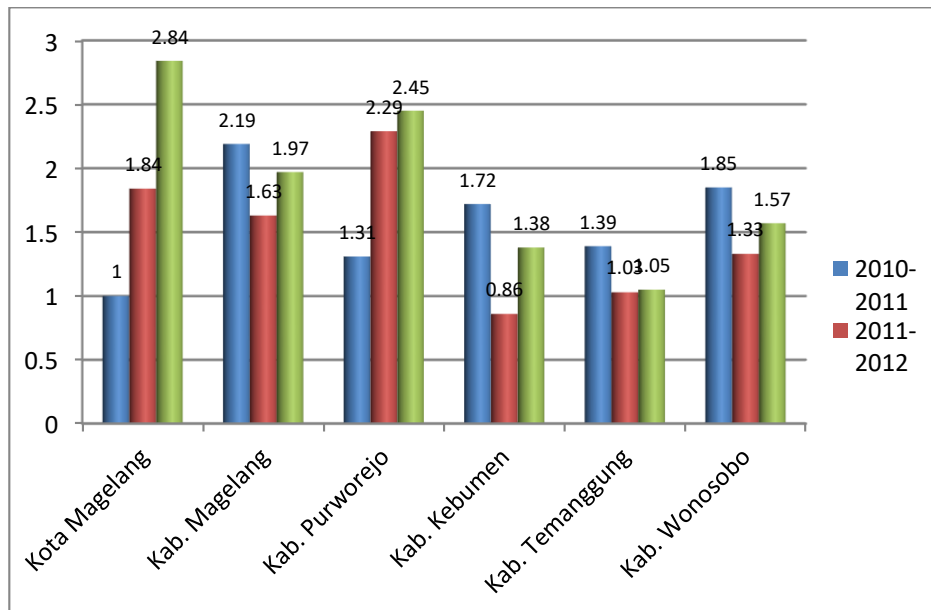
Selain mengamati besaran nilai IPM, kita juga dapat mengamati nilai *reduksi shortfall*. Nilai *reduksi shortfall* yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat, tetapi laju perubahannya cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Semakin tinggi nilai *reduksi shortfall* semakin cepat kenaikan IPM. Ukuran ini secara sederhana

menunjukkan perbandingan antara capaian IPM yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi ideal (IPM=100).

Nilai *reduksi shortfall* Kabupaten Wonosobo tahun 2010-2011 sebesar 1,85 persen dan 2012-2013 sebesar 1,57 persen, nilai ini merupakan nilai yang cukup tinggi dibandingkan beberapa kabupaten/kota di sekitarnya.

Gambar 2.3.

Reduksi *Shortfall* Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu, 2010-2013



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016

Jika dilihat secara lebih luas di tingkat Provinsi Jawa Tengah, sepanjang tahun 2011-2014 IPM Kabupaten Wonosobo selalu berada pada peringkat ke-30 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2014 IPM tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta disusul berikutnya IPM Kota Semarang masing-masing sebesar 79,10 dan 78,54. Sedangkan IPM terendah yaitu Kabupaten Brebes sebesar 69,85 atau selisih sekitar 2,05 poin dibandingkan IPM Kabupaten Wonosobo yang berada pada peringkat 31 se Provinsi Jawa Tengah.

Melihat perkembangan peringkat IPM yang selalu paling rendah dibandingkan kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Kedu dan peringkat ke-30 dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, sepatutnya mendorong Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator ini menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu

jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Secara umum, tingkat partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Sektor pendidikan masih perlu ditingkatkan terus, karena pendidikan merupakan dasar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin luas pola pikir masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Demikian pula partisipasi sekolah baik pada laki-laki maupun perempuan.

Secara umum, tingkat partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan selama dua tahun terakhir. Demikian pula partisipasi sekolah baik pada laki-laki maupun perempuan.

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Wonosobo, 2014

Jenjang Pendidikan	2012			2013			2014		
	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L+P
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
SD	110.73	105.56	108.03	110.87	110	110.42	110,23	112,65	111,33
SLTP	76.02	83.73	79.73	74.94	71.22	73.12	79,91	72,56	76,38
SLTA	53.73	49.35	51.64	36.46	41.34	38.4	41,61	53,92	47,22
PT	5.06	6.88	5.9	10.33	26.57	23.2	22,43	28,62	25,69

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016 Kabupaten Wonosobo

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi jumlah anak yang bersekolah tepat waktu. Bila semua anak bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Tabel 2.15
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Wonosobo, 2014

Jenjang Pendidikan	2012			2013			2014		
	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L+P
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
SD	95.29	93.98	94.61	99.30	97.45	98.35	99,64	98,39	99,07
SLTP	57.58	71.12	64.10	61.20	66.14	62.60	67,17	66,05	66,63
SLTA	31.10	36.73	33.78	26.85	29.20	27.78	32,55	33,99	33,21
PT	5.06	6.88	5.90	19.26	19.36	19.32	19,40	19,51	19,46

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016 Kab. Wonosobo

Pada tabel 2.15 pada tahun 2014 menunjukkan APM SD = 99,07 persen, sedangkan APK SD = 111,33 persen, ini berarti ada 12,26 persen atau 12 murid dari 100 murid mengalami tinggal kelas, terlambat masuk SD atau terlalu cepat masuk SD. Demikian pula untuk SLTP, SLTA dan perguruan tinggi.

d. Kesehatan

Upaya kesehatan di Kabupaten Wonosobo sejauh ini telah diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yang makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu dalam penanganan faktor-faktor tersebut harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan khususnya di bidang kesehatan, berikut ini disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan kesehatan dan gizi, pemanfaatan fasilitas kesehatan, status kesehatan dan gizi, dan indikator penunjang lainnya, begitu juga hasil yang telah dicapai.

Bayi dan balita merupakan golongan masyarakat yang dianggap paling rawan dari aspek kesehatan. Indikator yang berkaitan dengan kesakitan dan kematian bayi merupakan indikator penting dan sering dipakai untuk mengukur kemajuan suatu daerah, khususnya kemajuan bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan kesejahteraan bayi/balita sangat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dimana orang tuanya bertempat tinggal serta tingkat sosial ekonomi orang tua tersebut. Untuk itu ada yang berpendapat bahwa taraf hidup kesehatan bayi/balita adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan suatu daerah.

Rata-rata anak lahir hidup merupakan perbandingan antara banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang ibu dengan banyaknya ibu. Anak Lahir Hidup (ALH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah kelahiran hidup dari sekelompok penduduk perempuan selama masa reproduksinya. Pengaruh umur pada paritas ALH mencerminkan

pola hubungan yang positif, artinya, semakin tinggi umur perempuan, semakin banyak anak yang dimiliki, karena masa kemungkinan hamil semakin panjang (*time of exposure to risk*). Hubungan ini selain mencerminkan hubungan proses pembentukan keluarga, dapat juga memperlihatkan proses perubahan fertilitas antar waktu.

Tabel 2.16 disajikan data rata-rata anak yang pernah dilahirkan tahun 2010-2014. Rata-rata Anak Lahir Hidup per wanita 15 – 49 tahun di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 adalah 2,05, keadaan ini dirasa cukup baik, sehingga pemerintah dinilai cukup berhasil dalam menekan jumlah kelahiran.

Perubahan fertilitas kumulatif menurut umur dari satu periode ke periode berikutnya dapat mencerminkan perubahan fertilitas menurut *kohort*. Kendati hal ini tidak terlalu tepat, karena perempuan yang diamati pada suatu tahun sensus belum tentu merupakan perempuan yang sama pada tahun sensus berikutnya.

Tabel 2.16
Persentase Wanita 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Rata-rata Anak Lahir Hidup Kabupaten Wonosobo, 2010-2014

TAHUN	%WANITA PERNAH KAWIN	RATA-RATA ANAK	
		LAHIR HIDUP	MASIH HIDUP
2010	2,39	2,31	2,07
2011	2,44	2,02	1,90
2012	2,40	2,17	2,01
2013	2,43	2,05	1,93
2014	2,34	2,05	1,93

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

Selain itu untuk menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran dimana resiko kematian sangat tinggi, terdapat indikator Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Medis. Indikator ini adalah persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter, bidan dan tenaga medis lainnya. Jenis tenaga penolong persalinan menentukan keberhasilan persalinan dan akan berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi yang ditolong. Dalam hal ini persalinan yang ditolong oleh tenaga medis, seperti dokter, bidan dan tenaga medis lainnya dianggap lebih baik dibandingkan tenaga non medis seperti dukun, famili atau lainnya. Karena mereka telah mendapat bekal pendidikan dan pengetahuan formal mengenai cara pertolongan persalinan yang benar dan sehat. Walaupun demikian, persalinan di Kabupaten Wonosobo masih banyak dibantu oleh dukun, famili dan lainnya (pada tahun 2014 sebesar 8,18 %). Hal

ini erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi dan faktor budaya yang biasa terdapat di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2.17
Persentase Penolong Persalinan Balita
Kabupaten Wonosobo, 2010 - 2014

PENOLONG PERSALINAN	2010	2011	2012	2013	2014
Tenaga Medis	65,19	82,16	85,84	87,86	91,82
Bukan Tenaga Medis	34,81	17,84	14,16	12,24	8,18

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016 Kabupaten Wonosobo

Dalam 5 tahun terakhir penolong persalinan oleh tenaga medis mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan(Tabel 2.17). Tenaga medis mempunyai peranan penting dalam hal penolong persalinan, hal ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya penggunaan tenaga medis oleh masyarakat. Pada tahun 2010 sebesar 65,19 persen dan pada tahun 2014 naik menjadi 91,82 persen. Angka ini menunjukkan bahwa di masyarakat di Kabupaten Wonosobo ini menganggap kelahiran dengan ditolong oleh tenaga medis lebih aman daripada dengan tenaga non medis. Hal tersebut dapat menjadi kesimpulan bahwa adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat terutama dalam hal kesehatan ibu dan anak. Upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah persalinan dibantu tenaga bukan medis ditempuh dengan memperbanyak jumlah bidan melalui penempatan bidan di desa (Program Bidan Desa).

Selanjutnya, salah satu cara untuk melihat keberhasilan program kesehatan masyarakat adalah dari angka kesakitan. Angka ini menunjukkan jumlah penderita penyakit yang ada di lingkungan masyarakat. Adapun pengumpulan data kesehatan penduduk ini menggunakan pendekatan subyektif, yaitu berdasarkan pengakuan responden. Pada Tabel 2.18 di tahun 2014 menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih banyak daripada penduduk laki-laki, berikut adalah beberapa keluhan yang banyak dialami oleh penduduk perempuan seperti asma, pilek, batuk, diare dan sakit kepala.

Tabel 2.18
Persentase Penduduk Menurut Keluhan Utama yang Dialami Selama
Sebulan Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo, 2012 - 2014

Jenis Keluhan	2012			2013			2014		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L+P
Panas	4,38	2,50	3,41	5,63	3,77	4,60	6,33	3,81	8,05
Batuk	9,18	6,01	7,54	8,24	7,78	7,99	7,98	8,24	8,11
Pilek	12,01	12,27	12,14	9,45	11,93	10,82	8,54	13,11	10,86
Asma	0,70	0,98	0,85	1,53	0,65	1,04	0,28	0,73	0,51
Diare	3,55	1,65	2,57	1,27	1,69	1,50	1,11	2,07	1,60
Sakit Kepala	8,61	13,47	11,12	5,00	8,94	7,18	5,59	7,41	6,51

Jenis Keluhan	2012			2013			2014		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L+P
Sakit Gigi	11,25	9,27	10,23	11,07	9,69	10,31	11,44	8,72	10,06
Lainnya	50,32	53,85	52,14	57,81	55,55	56,56	55,88	55,91	57,30

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo

Meskipun Kabupaten Wonosobo telah mengalami banyak kemajuan sebagai hasil dari pembangunan, namun ketimpangan di bidang kesehatan masih cukup memprihatinkan. Selama ini perbedaan derajat kesehatan masyarakat antara daerah perkotaan dan pedesaan maupun antara penduduk miskin dengan penduduk yang mampu masih sangat besar. Namun demikian peningkatan pelayanan kesehatan khususnya di kantong-kantong kemiskinan terus diusahakan oleh pemerintah dari tahun ke tahun. Oleh karena berbagai macam kendala mengakibatkan banyak masyarakat miskin kurang memanfaatkan segala sarana yang ada, baik melalui berbagai jenis puskesmas (puskesmas biasa, puskesmas pembantu dan puskesmas dengan tempat tidur) maupun pelayanan rumah sakit.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas pemerintah daerah telah meningkatkan kuantitas dengan membangun atau memperbaiki puskesmas-puskesmas di desa-desa, dan sarana kesehatan lainnya seperti apotik. Sejalan dengan penambahan jumlah puskesmas dan jumlah apotik, maka penyediaan paket obat-obatan secara otomatis juga meningkat. Keadaan ini merupakan gambaran semakin membaiknya sarana kesehatan yang tersedia. Ditambah lagi dengan adanya pemanfaatan obat generik, sehingga penyediaan obat bermutu sebagai bagian dari pelayanan kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Demikian halnya dengan tenaga kesehatan yang meliputi dokter, perawat, para medis non perawat, dan tenaga akademis bidang kesehatan terus diusahakan. Namun kenyataannya banyak daerah yang kekurangan tenaga para medis terutama di daerah terpencil dan transmigrasi, sehingga banyak puskesmas pembantu yang hanya dikelola oleh seorang tenaga medis saja. Hal ini disebabkan karena penyebaran dokter tidak merata (umumnya berada di daerah perkotaan). Padahal idealnya di setiap puskesmas harus ada minimal satu dokter.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.19, dimana jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan PKD (Pos Kesehatan Desa) tahun 2014 sebanyak 224 buah, rumah bersalin 1 buah dan rumah sakit 3 buah, serta posyandu ada 1322 buah. Secara keseluruhan pembangunan sarana kesehatan di Kabupaten Wonosobo telah berhasil menurunkan rasio penduduk terhadap perawat/bidan, dokter dan puskesmas.

Tabel 2.19
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, 2010 – 2014

Tahun	Jenis Fasilitas Kesehatan				
	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Klinik	Puskesmas/Pustu/ PKD	Posyandu
2010	3	5	5	74	1300
2011	3	7	8	69	1311
2012	3	7	8	191	1320
2013	3	7	8	225	2349
2014	3	1	-	224	1322

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

e. Kemiskinan Daerah

Sepanjang 2012-2014 ada lima kabupaten/kota di Jawa Tengah yang persentase penduduknya miskinnya selalu berada pada posisi 5 terbawah (terbanyak persentasenya) termasuk Kabupaten Wonosobo. Sedangkan empat kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Brebes. Pada tahun 2012 persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat 35 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah, sedangkan kondisi tersebut tidak berubah sampai dengan tahun 2014 yaitu tetap pada peringkat ke-35 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Pada tahun 2012-2014 posisi persentase penduduk miskin Kabupaten Wonosobo kembali ke posisi terakhir dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Meskipun persentase penduduk miskin Kabupaten Wonosobo tergolong tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, namun naik turun persentasenya cukup signifikan. Pada kurun waktu 2012 -2014 penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Wonosobo mencapai 1,08 persen. Tentu saja ini merupakan kabar gembira yang bisa menjadi indikasi bahwa upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo memberikan hasil yang cukup nyata.

Tabel 2.20
Persentase Penduduk Miskin di 5 Kabupaten/Kota Peringkat Terbawah di Provinsi Jawa Tengah, 2012-2014

Kab./kota	2012	2013	2014	Peringkat Jateng		
				2012	2013	2014
Kab. Purbalingga	21,19	20,53	19,75	32	31	32
Kab. Kebumen	22,40	21,53	20,50	34	34	34
Kab. Wonosobo	22,50	22,08	21,42	35	35	35
Kab. Rembang	21,88	20,97	19,50	33	33	31
Kab. Brebes	21,12	20,82	20,00	31	32	33

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016

Dalam mengukur angka kemiskinan daerah perlu juga untuk diperhatikan garis kemiskinan. Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batasan untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.21
Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2011-2014

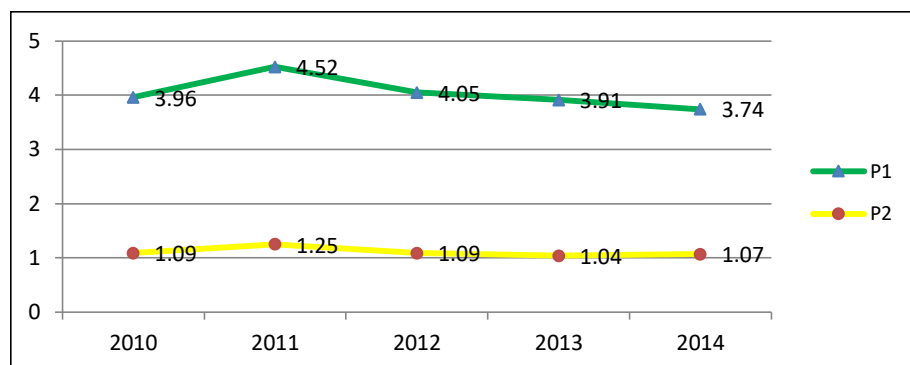
Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)
2011	226 827
2012	253 181
2013	258 522
2014	267 548

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016

Selama 2013-2014 garis kemiskinan Kabupaten Wonosobo naik sebesar 3,49 persen, yaitu dari Rp 258.522,00 per kapita per bulan menjadi Rp 267.548,00 per kapita per bulan. Garis kemiskinan Kabupaten Wonosobo tahun 2014 sebesar Rp 267.548,00 per kapita per bulan dapat diartikan bahwa pada tahun 2014 penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo adalah mereka yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah Rp 267.548,00. Sedangkan garis kemiskinan di tahun 2013 sebesar Rp 258.522,00 perkapita perbulan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Untuk sejauh mana kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Gambar 2.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) Kabupaten Wonosobo, 2010-2014



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016

Pada periode tahun 2010-2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan kecenderungan turun. Indeks Kedalaman Kemiskinan 3,96 pada tahun 2010 naik menjadi 4,52 pada tahun 2011 dan turun menjadi 4,05 pada tahun 2012 kemudian turun lagi menjadi 3,91 di tahun 2013 dan pada tahun 2014 turun lagi menjadi 3,74. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan 1,09 pada tahun 2010, naik menjadi 1,25 pada tahun 2011 dan turun menjadi 1,09 pada tahun 2012 dan kembali turun di tahun 2013 menjadi 1,04 dan naik sedikit pada tahun 2014 menjadi 1,07. Gambar 9.2. memberikan gambaran perkembangan P_1 dan P_2 Kabupaten Wonosobo sepanjang tahun 2010-2014.

Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa ada peningkatan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan penurunan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin menyempitnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

f. Tenaga Kerja

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa tenaga kerja tidaklah mungkin program pembangunan dapat dilaksanakan. Dari penduduk usia kerja di Kabupaten Wonosobo 69,50 persen adalah angkatan kerja, yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran, sedangkan 30,50 persen diantaranya bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Apabila diuraikan lebih lanjut dari penduduk yang berumur 15 tahun keatas, penduduk yang termasuk angkatan kerja dan melakukan kegiatannya dengan bekerja (69,95 %) sedangkan sisanya (3,94 %) pengangguran yang sering disebut dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sementara itu untuk penduduk bukan angkatan kerja melakukan kegiatannya dengan sekolah (5,26%), mengurus rumah tangga (16,59 %) dan lainnya (4,26 %).

Tabel 2.22
PersentasePenduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin
dan Kegiatan di Kabupaten Wonosobo, 2014

Uraian	2014		
	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja (AK)	87,60	59,89	73,90
- Bekerja	83,89	55,71	69,95
- Pengangguran	3,71	4,18	3,94
Bukan AK	12,40	40,11	26,10
- Sekolah	5,35	5,16	5,26
- Mengurus Ruta	2,33	31,15	16,59
- Lainnya	4,71	3,79	4,26
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016, Sakernas

Penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki bukan angkatan kerja. Tidak berbeda untuk penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja. Masih kentalnya tatanan sosial budaya masyarakat, dimana laki-laki sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk bekerja mencari nafkah, sehingga, angkatan kerja laki-laki (87,02%) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan (51,56%).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Keterlibatan dalam kegiatan ekonomi ini biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan jumlah penduduk Angkatan Kerja dengan penduduk usia kerja.

Berdasarkan hasil Sakernas 2014, TPAK total Kabupaten Wonosobo tercatat sebesar 73,90 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 73 orang diantaranya termasuk angkatan kerja aktif secara ekonomis. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, ternyata TPAK laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan TPAK perempuan, dimana TPAK laki-laki tercatat sebesar 87,60 persen sedangkan TPAK perempuan 59,89 persen. Hal ini berarti penduduk laki-laki yang aktif secara ekonomis lebih besar dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel 2.23
Persentase TPAK, Tingkat Kesempatan Kerja, dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Wonosobo, 2011 – 2014

Uraian	2011	2012	2013	2014
TPAK				
Total	72,00	76,24	64,50	73,90
Laki-laki	84,52	91,48	87,02	87,60
Perempuan	59,15	60,65	51,56	59,89
Tingkat Kesempatan Kerja				
Total	94,26	94,63	94,17	94,66
Laki-laki	94,40	95,52	94,39	95,76
Perempuan	94,05	93,24	93,80	93,02
Tingkat Pengangguran Terbuka				
Total	5,74	5,37	5,83	5,34
Laki-laki	5,60	4,48	5,61	4,24

Uraian	2011	2012	2013	2014
Perempuan	5,95	6,76	6,20	6,98

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016, Sakernas

Tingkat Kesempatan Kerja adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sedangkan angkatan kerja yang tidak terserap dikategorikan menganggur. Pada tahun 2014 tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Wonosobo sebesar 94,66 persen. Ini berarti sekitar 94 dari 100 penduduk angkatan kerja sudah bekerja, sedangkan 6 dari 100 penduduk lainnya masih menganggur (pengangguran terbuka). Penduduk yang tergolong pengangguran terbuka ini adalah penduduk yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, dan hanya mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja atau putus asa (sudah berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak pernah diterima bekerja).

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Sementara itu pada tahun 2014, tercatat TPT sebesar 4,24 persen untuk laki-laki dan 6,98 persen untuk perempuan, ini berarti bahwa dari 100 angkatan kerja laki-laki, 4 orang diantaranya menganggur, dan dari 100 angkatan kerja perempuan, 7 orang diantaranya menganggur. Hal ini terlihat oleh tingkat kesempatan kerja laki-laki (95,76 %) hampir sama besar dibanding tingkat kesempatan kerja perempuan (93,02 %).

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usahamerupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Disamping itu indikator tersebut juga bisa digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah/daerah.

Sektor pertanian masih mendominasi dalam menyerap tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan dimana lebih dari 54,05 persen pekerja, bekerja disektor ini. Selanjutnya sektor perdagangan (16,43%) menjadi pilihan kedua dan sektor jasa kemasyarakatan (13,55%) diikuti oleh sektor industri pengolahan (7,93%). Kemampuan sektor pertambangan dan penggalian (0,11%) dan listrik, gas dan air dalam menyerap tenaga kerja yang masih sangat kecil (0,06%), menandakan bahwa sektor ini belum dapat diandalkan dalam perekonomian di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2.24
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pertanian	54,28	58,13	54,24	57,19	54,05
Pertambangan	0,64	0	0,34	0,13	0,11
Industri Pengolahan	9,43	6,45	8,64	10,33	7,93
Listrik, gas dan air	0,16	0,22	0,11	0,18	0,06
Bangunan	5,52	5,86	5,8	1,66	3,92
Perdagangan ,rumah makan dan hotel	16,47	16,98	16,3	18,49	16,43
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	3,6	1,8	2,78	3,3	2,88
Keuangan dan jasa perusahaan	0,81	0,62	1,09	0,79	1,07
Jasa kemasyarakatan	9,09	9,93	10,61	7,93	13,55
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016, Sakernas

Indikator lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status dan jenis pekerjaan. Tabel 2.25 menunjukkan bahwa masih banyak pekerja di Kabupaten Wonosobo yang bekerja disektor informal. Hal ini terlihat dari tingginya persentase (41,94 %) pekerja dengan status berusaha sendiri dan berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap.

Tabel 2.25
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
di Kabupaten Wonosobo, 2013-2014

Status Pekerjaan	2010	2011	2012	2013	2014
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Berusaha Sendiri	13,96	11,71	16,08	17,68	17,29
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	35,71	37,49	30,91	34,42	35,28
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3,71	5,21	5,21	6,51	5,87
Buruh/karyawan/ pegawai	15,59	13,08	14,18	14,17	16,13
Pekerja bebas pertanian	8,63	7,43	8,58	3,96	4,59
Pekerja bebas non pertanian	9,37	10,23	10,58	2,04	6,39
Pekerja Keluarga	13,03	14,85	14,96	21,21	14,45
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016, Sakernas

C. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan umum di Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam Proses pembangunan baik mulai dari aspek perencanaan sampai dengan pelaksanaan perlu adanya evaluasi pelaksanaan kinerja dari suatu program dan kegiatan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan tersebut. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dapat diketahui informasi capaian kinerja untuk proses penyusunan kebijakan.

Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang mencerminkan realisasi penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan target yang diharapkan menurut visi dan misi Pemerintah Daerah serta sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah atau penyusunan kebijakan yang harus ditempuh berdasarkan kondisi capaian yang ada, dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar lebih terfokus, telah ditetapkan beberapa indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2015, dibagi menjadi kategori Fokus Layanan Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Wonosobo yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 dengan pelaksanaan :

- a. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah, melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan fasilitasi rintisan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.
- b. Pendidikan berkelanjutan, melalui Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia.
- c. Manajemen Pelayanan Pendidikan, melalui Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance*, mendorong

aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan, serta Penataan ulang kurikulum sekolah yang menjadi urusan daerah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model *link and match*).

Adapun capaian kinerja pembangunan Urusan Pendidikan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 secara umum dapat tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja secara umum yang memenuhi target capaian kinerja pembangunan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realiasi
1	APK PAUD	50	35,49
2	APK SD/MI/Paket A	105	109,39
3	APK SMP/MTs/Paket B	100	95,32
4	% kelulusan SD/MI	99,90	97,66
5	% kelulusan SMP/MTs minimal	99,90	99,96
6	Rasio Pendidik dengan peserta didik SD/MI	1:20	1:15
7	Rasio Pendidik dengan peserta didik SMP/MTs	1:16	1:14
8	Rasio murid dengan kelas SD/MI	1:31	1:24
9	Rasio murid dengan kelas SMP/MTs	1:36	1:30
10	Rasio murid dengan buku	1:1	-
11	APK SMA/SMK/MA	70	54,72
12	Rasio siswa SMK : SMA	70:30	53:47
13	Rasio Pendidik dengan peserta didik SMA/SMK/MA	1:16	1:13
14	Rasio murid dengan kelas SMA/SMK/MA	1:36	1:30
15	% Pendidik berkualifikasi S.1/D.4 mencapai :		
	a. pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	70	43,85
	b. pada Satuan Pendidikan SD/MI	100	65,90
	c. pada Satuan Pendidikan SMP/MTs.	100	88,48
	d. Pada Satuan Pendidikan SMA/MA dan SMK	100	95,52
16	% SD/MI menerapkan MBS	100	100
17	% SMP/MTs menerapkan MBS	100	100
18	% SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik.	100	100

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realiasi
19	Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SSM) SMA/SMK ISO 9001-2008	7	9

Menilik pada capaian kinerja pembangunan Urusan Pendidikan masih terdapat tujuh dari enam belas indikator yang capaiannya masih berada di bawah target seperti APK PAUD, APK SMP/MTs/Paket B, % kelulusan SD/MI, % kelulusan SMP/ MTs minimal, APK SMA/SMK/MA, rasio siswa SMK : SMA, rasio pendidik berkualifikasi S.1/D.4 pada semua satuan pendidikan (PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK).

Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2015 baru terealisasi sebesar 35,49 dari target yang ada sebesar 50. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari arti penting dari pendidikan anak usia dini dengan mengirimkan anak-anak ke lembaga PAUD. Meskipun telah ada upaya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan organisasi mitra dan masyarakat dalam mendiseminasikan manfaat yang diperoleh oleh anak ketika mengikuti proses di PAUD. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Mayoritas lembaga PAUD belum memenuhi standar pengelolaan yang layak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu kompetensi pengelola serta tenaga pendidik yang belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap tata kelola lembaga.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK SD/MI/Paket A melebihi target pada tahun 2015 yaitu 109,39 persen. Hal ini dapat dimaknai bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam jenjang pendidikan SD/MI/paket A. Sedangkan capaian APK SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masih berada di bawah target tahun 2015, yaitu 95,32 persen untuk APK SMP/MTs/Paket B dan 54,72 persen untuk APK SMA/SMK/MA. Kedepannya, perlu adanya kerjasama lintas pihak dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus mengupayakan untuk pemenuhan kebutuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo. Tahun 2015 merupakan momentum untuk mengukur ketercapaian dalam pemenuhan kesepakatan dan konsensus nasional maupun internasional. Pekerjaan terkait pendidikan menunggu pasca berakhirnya kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) dan Education For All pada akhir tahun 2015. Selain itu dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana terjadi peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Wonosobo harus mempersiapkan dengan baik peralihan kewenangan tersebut dan tetap memastikan bahwa pemenuhan akan pendidikan menengah dapat menjangkau seluruh masyarakat.

b. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memenuhi setiap warga negara Indonesia akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, menyadari bahwa kesehatan merupakan investasi untuk menghasilkan penduduk yang sehat, produktif dan berdaya saing, maka pembangunan kesehatan menjadi prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah. Relevan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo terus berupaya agar pelayanan kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh semua warga masyarakat.

Dalam dokumen RPJMD 2010-2015 juga sudah ditegaskan bahwa bahwa sasaran utamapembangunan kesehatan adalah (1) peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat; (2) perbaikan gizi mayarakat (3) pencegahan dan penanggulangan penyakit; (4) penyehatan lingkungan; (5) pelaksanaan program kesehatan preventif terpadu yang meliputi peningkatan desa siaga aktif dan perilaku hidup bersih dan sehat-PHBS; (6)pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan; dan (7) pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan.

Adapun capaian kinerja pembangunan Urusan Kesehatan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 sebagian besar dapat tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja secara umum yang memenuhi target capaian kinerja pembangunan bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	
		Target	Realisasi
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	99.77%
3	Prosentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))	97%	89.62%
4	Cakupan KB aktif	89.53%	83.30%
5	Cakupan pelayanan nifas	*90%	99.82%
6	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	92%	99.26%
7	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	87.25%	*73.26%
8	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100%	*109.63%
9	Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil	95%	98.29%

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	
		Target	Realisasi
12	Prosentase pelayanan kesehatan dasar sesuai standart	100%	100.00%
13	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/Kota	100%	100.00%
14	Prosentase PKD aktif	100%	*70.00%
15	Prosentase pelayanan apotek dan toko obat sesuai standart	*100%	*77.00%
16	Prosentase pelayanan kesehatan memiliki sarana prasarana pelayanan sesuai standart	75%	*70.00%
17	Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan	*1paket	*1 paket
18	Prosentase calon jamaah haji mendapat pelayanan kesehatan	*100%	*100.00%
19	Prosentase sistem rujukan sesuai standart	100%	*30.00%
20	Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan khusus	*50%	*50.00%
21	cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100.00%
22	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100.00%
23	Peningkatan posyandu lansia aktif	*10 posyandu	*10 posyandu
24	Prosentase status gizi baik pada anak sekolah dan pondok pesantren	*90%	*90.88%
25	Prosentase Balita datang dan ditimbang (D/S)	*86%	*82.02%
26	Prevalensi GAKY	20	*13.75%
27	Prosentase anemia pada ibu hamil dan remaja putri	20%	*18.00%
28	Prosentase bayi (0-6 bulan) yang mendapatkan ASI saja	80%	*69.05%
29	Prosentase bayi dan balita 6-59 bulan serta ibu nifas mendapat kapsul vitamin A	100%	99.68%
30	Prosentase daerah rawan pangan dan gizi	*5%	*0
31	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	100%
32	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100.00%
33	Prosentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan	70%	40.29%
34	Prosentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan	85%	*90.00%

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	
		Target	Realisasi
35	Prosentase penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate)	90%	*90.00%
36	Kasus malaria (Annual Paracite Indeks-API) per 1.000 penduduk	≤ 1	*0,06
37	Prosentase penderita malaria yang diobati	100%	*100.00%
38	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	<50	*1,17
39	Angka kematian DBD	<1%	*0
40	Prosentase penderita DBD yang ditangani	100%	100.00%
41	Prosentase suspek flu burung yang ditemukan dan ditangani sesuai standart	100%	tdk ada kasus
42	Prosentase kasus zoonosa (rabies, antraks, pes, leptospirosis) yang ditangani sesuai standart	100%	tidak ada kasus
43	Prosentase kasus filariasis yang ditangani	100%	100.00%
44	Prosentase ODHA yang mendapatkan anti Retroviral Treatment	90%	*100.00%
45	Prosentase darah donor diskriming terhadap HIV-AIDS	100%	*100.00%
46	Prosentase kasus Infeksi Melular Seksual (IMS) yang ditangani	100%	*100.00%
47	Prosentase desa/kelurahan UCI	100%	100.00%
48	Cakupan desa/kelurahan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	*100.00%
49	Prosentase diare balita yang ditangani sesuai standart	100%	*100.00%
50	Angka kematian diare	0	0,08
51	Non Polio Acute Flaccid Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥ 2	*4,2
52	Prosentase penderita pneumonia yang diobati sesuai standart	100%	*100.00%
53	Prosentase puskesmas melaksanakan surveilans dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular	100%	*100.00%
54	Prosentase rumah tangga sehat	80%	*67.08%
55	Prosentase desa siaga aktif	50%	100.00%
56	Jumlah pondok pesantren yang memiliki/melaksanakan poskestren	25	*15
57	Prosentase posyandu mandiri	60%	*15.30%
58	Terkelolanya SIK skala kabupaten	*100%	*100.00%
59	Tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan	100.00%	*100.00%

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	
		Target	Realisasi
60	Tingkat kecukupan vaksin untuk pelayanan imunisasi	100%	*100.00%
61	Tingkat kecukupan sarana prasarana pengelolaan dan pelayanan kefarmasian sesuai standart	100%	*75.00%
62	Prosentase instalasi farmasi dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan manajemen kefarmasian sesuai standart	80%	*60.00%
63	Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standart	50%	*33.30%
64	Prosentase Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) sesuai standart kesehatan	100%	*60.00%
65	Prosentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	100%	*90.22%
66	Prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	100%	*90.22%
67	Prosentase penduduk yang memiliki jamban sehat	80%	*43.01%
68	Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	25	*20
69	Prosentase rumah memenuhi syarat kesehatan	80%	*68.91%
70	Prosentase tempat umum memenuhi syarat kesehatan	77%	*56.45%
71	Prosentase tempat pengelolaan dan penjualan serta penggunaan pestisida aman bagi kesehatan	40%	*42.69%
72	Prosentase pengelolaan makanan minuman memenuhi syarat kesehatan	68%	*64.00%
73	Prosentase kualitas makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	*70%	*64.00%
74	Prosentase industri rumah tangga pangan yang memiliki SPP-IRT	*66%	*75.00%

Pembangunan urusan kesehatan pada tahun 2015 terus menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari sebagian besar realisasi indikator kinerja telah mencapai target pada tahun 2015.

c. Urusan Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur sebagai penjabaran dan pelaksanaan

Urusan Wajib Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 telah mencapai titik kulminasi dalam rangka percepatan target pembangunan fisik infrastruktur yang ditetapkan. Dalam sudut pandang konstruksi dan ekonomi, ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi nilai penting bahkan menjadi salah satu alasan utama dan prioritas kegiatan pembangunan.

Pada satu sisi infrastruktur dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan, pembukaan daerah terisolir/terpencil serta mempersempit disparitas antar wilayah. Di sisi lain infrastruktur juga berperan sebagai katalisator antara proses produksi, pemicu mekanisme pasar serta konsumsi akhir dari suatu produk, dalam hal ini infrastruktur mempunyai peran besar sebagai barang modal bergantungnya perkembangan ekonomi.

Strategi pengelolaan infrastruktur dalam kurun waktu 5 tahunan (RPJMD) kabupaten Wonosobo telah dijabarkan dalam suatu kerangka pikir sistematis melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan, sinergitas program dan kegiatan, peningkatan kemitraan strategis serta pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penanganan infrastruktur. Secara garis besar, pilar strategi pengelolaan infrastruktur tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Pembenahan internal merupakan langkah awal dalam keberhasilan program, maka usaha internal yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas SDM, bidang keteknikan, meletakkan personil sesuai dengan keahliannya dan penambahan SDM bidang keteknikan. Selain itu, usaha peningkatan kapasitas kelembagaan adalah pelaksanaan forum kemitraan bidang infrastruktur sebagai upaya membangun jejaring kemitraan bidang infrastruktur.
2. Mewujudkan sinergitas program dalam menentukan fokus dan lokus kegiatan. Tolok ukur keberhasilan tidak hanya pada capaian output saja tetapi sampai dengan outcomes (bagaimana infrastruktur yang terbangun dapat lebih bermanfaat), prioritas penanganan pada lokus yang tepat yaitu memperhatikan penataan ruang serta fasilitasi pada kawasan yang memiliki *pick up economic effect*, pembangunan infrastruktur juga memperhatikan pembangunan bidang strategis lain seperti pertanian, pariwisata, industri, sarana pemerintahan dan ekonomi.
3. Mewujudkan peningkatan kemitraan strategis dalam penanganan infrastruktur. Meletakkan masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk investasi infrastruktur oleh pihak swasta melalui mekanisme yang saling mengisi dan saling menguntungkan (*Public private Partnership*) guna mencapai tujuan penyediaan infrastruktur yang memadai.
4. Pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penanganan infrastruktur. Mendorong pembangunan daerah dengan mengacu konsep teknologi informasi yang modern dan transparan, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, efektif dan efisien, serta mempertimbangkan segala

aspek yang memerlukan kesiapan baik konsep, visi, manajemen yang baik serta penguasaan teknologi yang semakin maju.

Adapun capaian kinerja pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 secara umum belum dapat dikatakan tercapai secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja secara umum yang memenuhi target capaian kinerja pembangunan bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Pembangunan	
		Target	Realiasi
1	% Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	*100	57,19
2	% Daerah irigasi dalam kondisi baik	90	70,49
3	% Rumah tangga bersanitasi	80	47,95
4	Panjang jalan desa kondisi baik (km)	74.56	*
5	% Jumlah jembatan kondisi baik	77,18	*73,06

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum di tahun 2015 ini belum ada yang mencapai target. Namun demikian apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, mengalami kenaikan. Pada indikator "prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik" mengalami peningkatan sebesar 3,07% dari prosentase tahun 2014 yang mencapai 57,19%. Peningkatan ini menggambarkan bahwa selama kurun waktu 2015 program pembangunan jalan yang dibarengi dengan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sudah dilaksanakan dengan lebih baik. Laju pembangunan dan perbaikan masih lebih cepat dari pada laju kerusakan serta habisnya umur teknis jalan.

Sebaliknya, pada indikator "Prosentase daerah irigasi dalam kondisi baik" kinerja pembangunan daerah mengalami penurunan sebesar 2,26%. Adanya penurunan ini salah satunya disebabkan karena selama kurun waktu November hingga Desember 2015 laju curah hujan sangat ini. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya jaringan irigasi dan bendungan pensuplai jaringan irigasi yang jebol dikarenakan tekanan air yang besarnya melebihi kapasitas diperparah oleh menurunnya kondisi bangunan akibat umur teknis yang hampir habis.

Kecenderungan yang berbeda terjadi pada indikator "prosentase rumah tangga bersanitasi" yang mengalami peningkatan hampir 9,03 % dan indikator prosentase kawasan kumuh yang menurun 0,47 %. Peningkatan tersebut memperlihatkan adanya perbaikan pada sarana dan

prasarana pendukung sanitasi yang dilaksanakan salah satunya melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan. Meskipun begitu, apabila dibandingkan dengan target yang diamanatkan dalam RPJMD 2010-2015 maka angka sebesar 47,95% masih belum dapat memenuhi target sebesar 50%.

Dibutuhkan kerja keras dan yang lebih baik lagi untuk memenuhi target (yang diamanatkan oleh RPJMD) serta meningkatkan kinerja pembangunan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan keberadaan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan.

d. Urusan Tata Ruang

Pertumbuhan penduduk mengakibatkan penambahan rumah, infrastruktur, fasilitas umum dan sosial, sementara luas ruang yang tersedia tetap. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan ruang yang ada agar tetap nyaman beraktivitas, pertumbuhan masyarakat ini harus dikontrol. Kontrol dapat dilakukan dengan upaya penataan ruang. Urusan penataan ruang menjadi salah satu urusan wajib yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk ikut mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Ruang wilayah yang tetap dan terbatas, sementara kebutuhan ruang yang meningkat menjadikan alih fungsi pemanfaatan ruang dalam pembangunan menjadi tidak terkendali. Hal itu dapat berdampak pada terjadinya bencana ekologis karena alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya, ataupun kerawanan pangan karena banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Dalam rangka mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dibutuhkan penataan ruang. Idealnya, semua kegiatan pembangunan khususnya yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang.

Adapun capaian kinerja pembangunan Urusan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 secara umum dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja dengan target pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Pembangunan	
		Target	Realisasi
1	Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang (Perda RTRW)	Ada	Ada (Perda No. 2 Tahun 2011)
2	% Ketaatan pada RTRW	50%	40%
3	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	*43	41
4	Dokumen RDTR	*15 RDTR	13 RDTR
5	Perda RDTR	*15	0

Dari hasil capaian kinerja Urusan Penataan Ruang pada tahun 2015, secara umum sudah dilaksanakan secara baik. Untuk ketersediaan dokumen

regulasi, masih tetap/stagnan, baru ada peraturan daerah terkait RTRW Kabupaten. Belum ada rencana rinci yang ditetapkan menjadi peraturan daerah, meskipun naskah studi akademik RDTR telah bertambah tiap tahunnya (meningkat dalam hal jumlah). Hal ini karena, terkait dinamika perubahan kebijakan di tingkat pusat dan provinsi terkait proses legalisasi raperda RDTR, dan waktu yang dibutuhkan sangat panjang karena proses yang rumit. Selain itu, syarat kelengkapan terutama data spasial materi peta RDTR belum memenuhi syarat dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Indikator yang capaiannya mendekati target adalah rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah HPL/HGB. Meskipun belum mencapai target, namun masih dijauh di atas angka 30% luasan sebagai syarat minimal luasan RTH di suatu wilayah. Asumsi perhitungan yang digunakan yaitu satuan luas wilayah HPL/HGB meliputi seluruh luasan wilayah Kabupaten, bukan kawasan perkotaan saja (umumnya indikator RTH lebih mengarah pada kawasan perkotaan), serta kategorisasi jenis RTH yang diluar kawasan perkotaan ikut dimasukkan dalam perhitungan. Dengan demikian, wajar saja jika dilihat dari tutupan lahan di seluruh Kabupaten Wonosobo yang berada di daerah pegunungan, untuk luasan RTH memang masih besar meskipun ada penurunan luas RTH. Hal yang patut dilakukan adalah, upaya untuk tetap mempertahankan luasan RTH minimal 30% dari luas kawasan perkotaan (bukan total luas kabupaten). Jika mengacu pada kabupaten dan batas ekologi DAS, yang mensyaratkan minimal 30% berupa hutan, maka Wonosobo masih mencukupi untuk ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan hutan.

Selanjutnya, terkait dengan indikator persentase ketaatan meskipun belum mencapai target akan tetapi ada peningkatan cukup signifikan, yang ditandai dengan semakin meningkatnya masyarakat, instansi yang akan mengubah fungsi ruang dengan menanyakan informasi tata ruangnya di Bappeda. Hal ini didukung pula oleh koordinasi yang baik antara Bappeda (selaku sekretaris BKPRD), KPPT (instansi pemberi izin tertentu), dan kantor Pertanahan (terkait izin IPPT), yang mensyaratkan setiap proses sertifikasi, alih fungsi lahan agar menyertakan syarat surat informasi tata ruang. Penerapan kebijakan tersebut dinilai cukup efektif untuk membiasakan sekaligus mengkampanyekan kepada masyarakat untuk bersama menata ruang sesuai dengan arahan penataan ruang dalam Perda RTRW Kabupaten Wonosobo 2011-2031.

e. Urusan Perencanaan Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan secara terencana dan sistematis menuju suatu kondisi yang lebih baik. Pembangunan merupakan suatu konsep yang akan relevan hingga kapan pun, karena peradaban manusia selalu berubah selaras dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Dalam rangka mewujudkan perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mempunyai dokumen perencanaan, yang terdiri atas perencanaan jangka panjang (RPJPD) untuk perencanaan 20 tahunan dan perencanaan jangka

menengah (RPJMD) untuk perencanaan pembangunan 5 tahunan. Masing-masing dokumen perencanaan tersebut telah berketetapan hukum melalui Peraturan Daerah Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010–2015. RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah, sedangkan RPJMD pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD selanjutnya dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD selama 5 tahun serta menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya.

Adanya konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah akan menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif karena adanya proses pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga jalan panjang upaya pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud secara nyata. Selain itu, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Adapun capaian kinerja pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2015 secara umum dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target capaian kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Pembangunan	
		Target	Realisasi
1	Tersedianya Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kab	Ada	ada
2	Tersedianya dok perencanaan pembangunan daerah :		
	a. RPJMD	Ada	Ada
	b. RKPD	Ada	Ada
	c. % kesesuaian RKPD dgn RPJMD	90	85
	d. (%) kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD	100	100
	e. (%) kesesuaian Program Renstra SKPD dengan RPJMD	95	80
3	% Ketepatan waktu tahapan Musrenbang RKPD	100	100
4	% kesesuaian program RKPD dgn APBD	100	81,29

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Pembangunan	
		Target	Realisasi
5	Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan	Ada	Ada
6	Tersedianya data profil daerah	Ada	Ada

Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum sudah dilaksanakan dalam rangka memenuhi target yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wonosobo telah disusun pada tahun 2014. Dengan hadirnya Perda Perencanaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo.

Dalam rangka mewujudkan perubahan yang dilakukan secara terencana dan sistematis menuju suatu kondisi yang lebih baik maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo mempunyai dokumen perencanaan, yang terdiri atas perencanaan jangka panjang (RPJPD) untuk perencanaan 20 tahunan dan perencanaan jangka menengah (RPJMD) untuk perencanaan pembangunan 5 tahunan. Masing-masing dokumen perencanaan tersebut telah berketetapan hukum melalui Peraturan Daerah Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010–2015.

Dalam rangka penyusunan dokumen rencana tahunan (RKPD) diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai **Musyawarah Perencanaan Pembangunan** atau **Musrenbang** RKPD. Forum-forum musyawarah dari tingkat RT, RW, dan dusun dan desa/kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari 2015, pada tingkat kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari 2015 dan Forum SKPD, gabungan SKPD, dan musrenbang kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret 2015. Adapun hasil Musrenbang Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 digunakan untuk penyusunan RKPD tahun 2016. Dokumen RKPD tahun 2016 tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati No.51 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 247 disebutkan pula perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah (data profil). Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau yang disingkat SIPD ini merupakan instrumen pendukung program pembangunan daerah yang amat penting dan strategis sebagai upaya memperkuat perencanaan

pembangunan daerah. SIPD merupakan sistem pengelolaan data informasi untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan analisa kinerja daerah dengan pemanfaatan sistem informasi. SIPD ini merupakan dokumen hasil pengolahan data dan informasi yang berasal dari seluruh SKPD dan instansi vertikal di Kabupaten Wonosobo. Pengembangan sistem ini secara umum diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

f. Urusan Perumahan

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia dalam pemenuhannya harus memenuhi fungsi sebenarnya sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Seperti yang diamanahkan dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang layak dapat diwujudkan dengan memberi perhatian besar pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta pelaksanaan pembangunan perumahan yang sinergis dan melingkupi berbagai bidang. Pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan yang menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait serta rencana, program dan prioritas pembangunan perumahan permukiman.

Dengan terciptanya kualitas lingkungan yang sehat, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dapat memberikan indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berarti bahwa hasil atau dampak pembangunan yang dalam skala luas sudah dirasakan oleh masyarakat.

Pertambahan penduduk yang pesat, penyebaran penduduk yang tidak merata, tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi yang rendah serta terbatasnya sarana dan prasarana permukiman menyebabkan makin banyaknya rumah yang tidak sehat dan tidak layak huni. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah daerah dalam rangka mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Antara lain dengan pemugaran rumah tidak layak huni, perbaikan sapras di lingkungan rumah tidak layak huni, pemberian stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni dsb. Terkait dengan hal tersebut pada tahun 2015 ini Pemerintah daerah dalam urusan perumahan melakukan Penataan lingkungan perumahan yang mendukung terciptanya kualitas lingkungan sehat melalui pemugaran rumah tidak layak huni dan perbaikan sanitasi lingkungan, penyediaan air bersih dll.

Salah satu indikator dalam SPM bidang perumahan adalah tersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai, dimana PSU yang cukup penting adalah ketersediaan sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan dan lingkungan. Indikator tersebut juga didukung oleh salah satu sasaran pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 2015 – 2019, bahwa pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi melalui pencapaian universal access yaitu tercapainya

100% pelayanan air minum dan tercapainya 100% pelayanan sanitasi serta 0% kawasan kumuh.

Adapun capaian kinerja pembangunan pada Urusan Perumahan tahun 2015 secara umum dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Capaian
1	Rasio jumlah rumah per jumlah KK	0,99	0,863
2	Rasio rumah layak huni per jumlah total rumah	0,95	0,885
3	Jumlah kompleks perumahan yang dibangun pengembang	20	27
4	% luasan permukiman kumuh	0	0,796
5	% Rmh tangga pengguna air bersih	100%	95,35
6	% taman lingkungan/ruang terbuka hijau dari luasan pemukiman	39%	44,29
7	Jumlah sarana pelayanan penanganan bencana kebakaran	2	3

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa dari tujuh indikator kinerja pembangunan daerah Urusan Perumahan baru tiga indikator yang telah mencapai target pada tahun 2015. Ketiga indikator tersebut adalah jumlah kompleks perumahan yang dibangun pengembang, % taman lingkungan/ ruang terbuka hijau dari luasan pemukiman dan jumlah sarana pelayanan penanganan bencana kebakaran. Terkait dengan indikator rasio rumah layak huni per jumlah total rumah, pemerintah daerah telah berupaya memenuhi kebutuhan rumah yang layak pada tahun 2015, melalui beberapa program dengan sasaran untuk mengurangi rumah tidak layak huni. Dalam pencapaian indikator rasio jumlah rumah layak huni pada tahun 2015 ini ada sekitar 1091 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Kabupaten Wonosobo, mendapatkan alokasi dana untuk perbaikan rumah layak huni. Dari 1091 KK, 673 KK melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp 9.140.000.000,00 dengan kategori rumah rusak berat mendapat bantuan @ 15 juta sedangkan yang rusak ringan sebesar @ 10 juta. Kemudian ada 100 KK yang mendapat bantuan dari dana APBD Provinsi sebesar Rp. 210.000.000,00 atau rata-rata 10 jt per KK, 303 KK dari dana APBD Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 3.030.000.000,00 dan sisanya 64 KK dari dana Yakaumi Pemda Kab. Wonosobo dengan dana sebesar Rp. 256.000.000,00 atau rata-rata 4 juta rupiah per KK,. Dari beberapa program tersebut berhasil menambah nilai capaian sebesar 0,005 atau sekitar 0,53% dari jumlah rumah. Dengan asumsi kenaikan jumlah rumah per tahunnya 0,45% pada tahun 2015

terjadi peningkatan sebesar 969 rumah sehingga jumlah total rumah menjadi 216.403 di tahun 2015, dengan jumlah rumah di tahun 2014 sebesar 215.434 rumah.

Capaian Proporsi jumlah rumah layak huni per jumlah total di tahun 2015 belum mencapai target 0,95. Namun demikian rasio jumlah rumah layak huni per jumlah total rumah mengalami kenaikan dari 0,734 di tahun 2014 menjadi 0,885 di tahun 2015.

Capaian rumah tangga pengguna air bersih juga belum mencapai target di tahun 2015 sebesar 100 persen. Namun demikian capaian indikator ini mengalami peningkatan hal ini berdasarkan data dari PDAM Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, jumlah pelanggan/sambungan air mengalami peningkatan, dari 75.154 sambungan di tahun 2014 menjadi 79.155 sambungan di tahun 2015. Selain itu pada tahun yang sama ada 13 Desa yang masuk pada penanganan kegiatan PAMSIMAS baik PAMSIMAS reguler maupun PAMSIMAS HID, selain program pengembangan air bersih yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Di tahun 2015, sebagai hasil dari pendampingan program Fasilitas Mitra Prima ada 4 BPSPAM yang berhasil mengakses lembaga keuangan untuk pengembangan dan pengelolaan SPAM Perdesaan. Keempat BPSPAM tersebut adalah BPSPAM Sumber Lestari Desa Lancar Kec. Wadaslintang, BPSPAM Tirta Sari Desa Ngadimulyo Kec. Selomerto, BPSPAM Sumber Sirancah Desa Serang Kec. Kejajar dan BPSPAM Sumber Sikandang Desa Ngadisalam Kecamatan Sapuran. Diharapkan dengan berhasilnya BPSPAM tersebut mengakses lembaga keuangan selain dapat mengembangkan SPAM di desanya juga dapat memicu BPSPAM yang lain untuk ikut dalam mengembangkan dan memajukan BPSPAM di desa lainnya.

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana kebakaran, pada tahun anggaran ini melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo menambah peralatan berupa pengadaan mobil pemadam kebakaran, truck tangki dan mobil operasional yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja pemadam kebakaran.

g. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika Pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan, pada gilirannya akan merusak lingkungan hidup. Seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif.

Dengan memperhatikan kecenderungan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang semakin meningkat, semua pihak diharapkan menempatkan isu pembangunan lingkungan hidup sebagai prioritas utama dalam setiap pendekatan pembangunan. Pengarusutamaan lingkungan hidup seharusnya dijadikan dasar dalam pembuatan perencanaan pembangunan dan implementasi pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menempatkan urusan bidang

lingkungan hidup sebagai salah satu urusan wajib dan harus diselenggarakan secara optimal berdasarkan kewenangan yang ada di daerah. Bahwa berdasarkan pengaturan pasal 12 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan bidang Lingkungan Hidup telah mengalami perubahan, dimana urusan tersebut telah ditetapkan sebagai urusan wajib akan tetapi tidak memiliki pelayanan dasar.

Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2015, dapat dilihat capaian kinerja pembangunan sebagai berikut:

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	Kualitas / kelas air	1	1
2	% kelestarian sumber air	100	80
3	% peningkatan debit sumber air	100	2
4	% meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pabrik	50	1
5	% meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pemukiman	50	1
6	% meningkatnya kualitas udara ambien di daerah transportasi	50	1
7	% menurunnya kasus kebakaran hutan	10	1 kasus
8	Rasio kesesuaian regulasi bidang LH	100	-
9	Nilai Adipura	76	74,50
10	Jumlah CSR yg diberikan utk mendukung penyelamatan lingkungan (perusahaan)	6	4
11	% peningkatan penyerapan CO2	60	75

Secara umum capaian kinerja pada Urusan Lingkungan Hidup belum memberikan capaian yang baik. Dari 11 indikator kinerja terdapat 6 indikator yang belum tercapai / berkinerja baik antara lain : % peningkatan debit sumber air, % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pabrik, % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pemukiman, % meningkatnya kualitas udara ambien di daerah transportasi, Jumlah CSR yg diberikan utk mendukung penyelamatan lingkungan (perusahaan) dan % kelestarian sumber air.

h. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Pemuda mempunyai peran yang strategis dalam mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaannya, terutama sejak dimulainya era pergerakan nasional. Tidak hanya menjadi ujung tombak dalam perjuangan kemerdekaan, para pemuda juga berfungsi secara optimal dalam pembaruan dan pembangunan nasional pasca kemerdekaan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan potensi

para pemuda harus menjadi isu besar dalam proses pembangunan nasional. UU kepemudaan mewajibkan pemerintah untuk melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, hal tersebut dilakukan dalam menjalankan program penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan para pemuda. Sinergisasi strategis yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat dan pihak pemuda itu sendiri yang dalam hal ini adalah organisasi kepemudaan, salah satunya dengan membentuk tenaga kepemudaan yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan kepemudaan.

Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang olahraga menyebutkan bahwa olahraga adalah kegiatan sistematis untuk mendorong, mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial. Oleh karenanya Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan tentang olahraga.

Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2015, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu :

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Kinerja
1	Jumlah kegiatan produktif kepemudaan	12	7
2	Jumlah organisasi kepemudaan	142	142
3	Jumlah sarpras olahraga standar nasional	3	2

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa dari tiga indikator kinerja pembangunan di Urusan Pemuda dan Olahraganya satu indikator yang mencapai target yaitu jumlah organisasi kepemudaan. Sementara itu indikator jumlah kegiatan produktif kepemudaan dan jumlah sarpras olahraga standar nasional masih berada di bawah target tahun 2015.

Kegiatan-kegiatan kepemudaan berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran sertapemuda dalam berbagai bidangpembangunan. Kegiatan tersebut di antaranya adalah - dialog pemuda, pelatihan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepemimpinian dan kepeloporan serta kegiatan lain dalam wadah organisasi kepemudaan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Tema dan fokus kegiatan bervariasi namun dari jumlah kegiatan dan jumlah organisasi kepemudaan masih berkisar di 142 organisasi.

Pada tahun 2015 Kabupaten Wonosobo menjadi tuan rumah

Pelatihan Kemah Relawan Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda yang bertempat di Pondok Wisata Agrowisata. tujuan kegiatan Pelatihan ini untuk menggelorakan semangat yang menjadi nilai fundamental bangsa yang di maknai saling tolong menolong melalui kemah pemuda relawan Indonesia dan meningkatkan skill manajerial dan teknis para pemuda relawan melalui kegaitan edukatif, intraktif dan praktis dengan cara melibatkan trainer, narasumber dan praktisi kesukarelawanan yang berpengalaman dan handal.

i. **Urusan Penanaman Modal**

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah. Terjadinya perkembangan PDRB potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita yang makin meningkat. Standar hidup masyarakat di suatu daerah akan meningkat secara perlahan melalui pengaruh kenaikan tabungan dan investasi.

Investasi atau penanaman modal adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sementara itu pembangunan di dalam era otonomi daerah sekarang ini, pada intinya adalah berupa pemberdayaan daerah. Oleh karena itu daerah harus mampu mengatur, mengurus, dan mengelola kepentingan serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Pemberdayaan daerah perlu dilakukan oleh semua komponen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Dalam rangka meningkatka investasi di daerah,perlu upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi.Upaya yang dilakukan pemerintah daerah antara lain dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal, menciptakan iklim investasi yang baikdengan kemudahan dalam proses perijinan, stabilitas politik dan perekonomian yang mendukung dan peningkatan kualitas infrastruktur.

Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Penanaman Modal pada tahun 2015, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu :

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	Jumlah Investasi	3	2.856
2	Nilai Investasi (milyar)	150,6	1.098,86

Secara umum capaian kinerja pada Urusan penanaman modal dapat tercapai dengan baik. Dari 2 indikator kinerja terdapat 2 indikator yang sudah tercapai / berkinerja baik. Capaian kinerja urusan Penanaman Modal Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di mana pada tahun 2015 realisasi penanaman modal

dilihat dari jumlah investasi sebesar 2.856 dengan nilai investasi sebesar 1.098,86 milyar. Nilai investasi pada tahun 2015 ini sudah melampaui target RPJMD 2010-2015 sebesar 150,6 milyar.

j. Urusan Koperasi dan UMKM

Arah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM antara lain perlu adanya peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM di Kabupaten Wonosobo sehingga akan mampu bersaing dengan produk impor di pasaran, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi merupakan salah satu upayanya selain juga perlu adanya sertifikasi bagi produk-produk UMKM.

Koperasi sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas posisi yang ditimbulkannya. Sementara itu UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional.

Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Koperasi dan UMKM pada tahun 2015, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu :

Tabel 2.35.
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Pembangunan	
		Target	Realisasi
1	Jumlah UMKM	*58.216	58.162
2	Jumlah Koperasi	*341	359
3	Jumlah Koperasi aktif	327	222
4	Jumlah aset koperasi (juta)	600	1.100
5	Jumlah aset UMKM (juta)	29.700	38.521

Indikator kinerja pembangunan daerah urusan Jumlah UMKM Kabupaten Wonosobo tahun 2015 yang berstatus kinerja baik adalah jumlah koperasi, jumlah aset koperasi dan aset UMKM. Ketiga indikator ini realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Sedangkan indikator yang capaiannya cukup baik adalah jumlah UMKM dan jumlah koperasi aktif.

k. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam penyelenggaraan Urusan kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Kabupaten lebih menfokuskan pada proses administrasi Kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan dan perlu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Pemerintah telah memfokuskan pembangunan di sektor kependudukan pada bidang penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan percepatan pembangunan database kependudukan, penertiban administrasi kependudukan serta pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selaras dengan rencana kerja pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo berkomitmen melaksanakan program penataan administrasi kependudukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan bidang pencatatan sipil;
- b. Sosialisasi Elektronik KTP (e-KTP);
- c. Pemeliharaan jaringan online dan sistem SIAK Depdagri;
- d. Penyegaran operator KTP dan Pembantu Bendahara Penerima KTP di Kecamatan.

Pelaksanaan pembangunan pada Urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2015, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu :

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan sipil
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	% jumlah pemilik KTP berbasis NIK	100	88,52
2	% Jumlah kepemilikan KK	100	99,8
3	% kepemilikan Akta kelahiran	100	79,03
4	% penduduk yang teregistrasi (jumlah penduduk yang mempunyai NIK)	100	100
5	% Anak Lahir yg membuat Akta Kelahiran	100	99,58
6	% penduduk meninggal yg membuat Akta Kematian	0,2	10,74
7	lama pengurusan Akte kelahiran	1 hari	5 hari
8	lama pengurusan KTP	1 hari	5 hari

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup yang tertera di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk). Sampai dengan kondisi saat ini, kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP tersebut belum sepenuhnya dimiliki. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel di atas bahwa persentase jumlah pemilik KTP berbasis NIK hingga tahun 2015 masih berada pada angka 88,52% di bawah target tahun 2015 sebesar 100%. Belum tercapainya target persentase jumlah pemilik KTP berbasis NIK disebabkan oleh masih banyaknya penduduk wajib KTP baik itu wajib KTP baru (usia 17 tahun) maupun wajib KTP lama yang belum melaksanakan perekaman KTP-E. Penyebab lain dalam penurunan angka tersebut yaitu karena keterbatasan jumlah blangko e-KTP yang diterbitkan oleh kementerian pusat. Dalam hal perencanaan kebutuhan jumlah blangko e-KTP tersebut, Kantor Adminkabupaten sebenarnya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan kekurangan kepemilikan KTP tersebut. Hanyasaja, praktek dilapangan masih banyak kasus penggantian KTP baru dikarenakan rusak, hilang dan peralihan status dalam KTP tersebut. Keterbatasan blangko e-KTP tersebut juga berdampak pada indikator lain, yaitu lama pengurusan Akte kelahiran dan lama pengurusan KTP, karena jumlah penumpukan pemohon data kependudukan yang setiap hari semakin bertambah.

I. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan merupakan urusan yang dinamis, yang selalu menjadi bahasan menarik, terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui kemampuan pembangunan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, semakin besar kemampuan pembangunan dalam menciptakan kesempatan kerja semakin tinggi nilai keberhasilan dari pembangunan tersebut.

Urusan teknis ketenagakerjaan harus mengupayakan terwujudnya masyarakat Wonosobo yang mempunyai daya saing pada kontalasi nasional, daya saing akan terwujud bila tenaga kerja yang ada mempunyai ketrampilan, keahlian ataupun kompetensi tertentu berdasarkan bakat dan minatnya dalam bidang pekerjaan yang ada, tentunya ketrampilan, keahlian ataupun kompetensi yang sudah dimiliki oleh tenaga kerja akan menjadi nilai tawar baginya untuk mendapatkan pekerjaan ataupun membuka usaha mandiri atau berwira usaha yang diharapkan akan meningkatnya pendapatan yang akan menjadikan kesejahteraan masyarakat Wonosobo menjadi semakin lebih baik lagi.

Di Kabupaten Wonosobo memiliki isu strategis urusan ketenagakerjaandiantaranya yaitu belum meratanya peluang kerja serta rendahnya aksesibilitas kesempatan kerja pada berbagai sektor unggulan yang sesuai dengan sebagian besar kondisi kompetensi SDM tenaga kerja, serta adanya peningkatan pengangguran yang disebabkan oleh tingginya tingkat *turn over* pegawai di perusahaan. tantangan menciptakan lapangan kerja, mata pencaharian berkelanjutan dan pertumbuhan berkeadilan melalui pengurangan jumlah kaum muda yang menganggur. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pendidikan non formal dalam rangka membekali angkatan kerja dengan keahlian di bidangnya guna menekan angka pengangguran terbuka di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2015, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu :

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	% Tingkat pengangguran terbuka (Jumlah pekerja yang ditempatkan) / (Jumlah pekerja yang mendaftar)x100 %	50.22%	2663/5862X100%= 45,43%
2	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	4000	2.663
3	Jumlah BKK (Bursa Kerja Khusus)	40	22
4	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	256	444
5	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	215	336
6	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	1.000	150
7	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian kerjasama	*6	4
8	Rasio UMR dan KHL	UMR:Rp 1.166.000,00 KHL: Rp 1.166.000,00	UMR:Rp 1.166.000,00 KHL: Rp 1.166.000,00
9	Jumlah pekerja/buruh yang ikut program Jamsostek	4100	6168

No.	Indikator	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
10	Jumlah besaran pemeriksaan perusahaan	180	40
11	Jumlah besaran pengujian peralatan perusahaan	115	30

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 masih cukup tinggi yaitu 45,43%, yang berarti masih banyak pencari kerja yang belum berhasil ditempatkan atau belum berhasil memperoleh pekerjaan. Untuk itu, melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat tercipta kesempatan bekerja yang dapat memperbaiki taraf hidup tenaga kerja dan keluarganya yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan juga telah menghasilkan kenaikan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan berbasis kompetensi serta pelatihan kewirausahaan pada tahun 2015 sebagaimana tampak pada tabel diatas, sehingga diharapkan dapat membekali para calon tenaga kerja dengan pengetahuan dan ketrampilan sehingga mereka mampu membuka usaha secara mandiri.

Sementara itu, melalui pemberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang dapat dipatuhi oleh pekerja dan pengusaha, akan menciptakan kondisi iklim kerja yang kondusif dan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja sebagai hak dasar pekerja akan lebih terjamin. Implementasi program ini dalam beberapa kegiatan yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan kegiatan dewan pengupahan kabupaten, penyelesaian kasus TKI bermasalah, penyelesaian klaim JHT Jamsostek, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan peningkatan lembaga ketenagakerjaan LKS bipartit, tripartit, dan serikat pekerja sehingga diharapkan adanya hubungan harmonis antara pemerintah, perusahaan dan serikat pekerja yang akan mendukung terciptanya iklim usaha kondusif, pada akhirnya mampu menarik investor masuk ke Wonosobo.

m. Urusan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi isu strategis nasional sekaligus daerah pada tahun 2015. Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pengamanan ketahanan pangan menjadi salah satu sasaran pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan nasional dan daerah yang kuat dan tangguh. Untuk memantapkan dan

meningkatkan ketahanan pangan yang berbasis pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga sub sistem ketahanan pangan yaitu : a) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, b) sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan dan c) sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.

Melalui urusan ketahanan pangan, pemerintah daerah wajib melakukan tiga hal. Pertama, memastikan ketersediaan pangan di daerah. Artinya masyarakat memiliki stok pangan yang cukup, aman, bergizi. Pangan yang dimaksud bisa bersumber dari pangan lokal ataupun impor. Kedua, memastikan kemampuan akses fisik dan ekonomi dari masyarakat terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis sepanjang waktu dan di mana saja. Ketiga, memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat itu sudah memenuhi standar gizi dan kesehatan.

Selaras dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD 2010-2015 bahwa salah satu misi pembangunan Kabupaten Wonosobo adalah meningkatkan pelayanan sosial dasar masyarakat yaitu dengan mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan sasaran pembangunannya diarahkan pada meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama dan meningkatnya konsumsi protein hewani dan nabati. Untuk itu strategi dan arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dan peningkatan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal.

Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2015, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu :

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketahanan Pangan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Kinerja
1	Jumlah desa mandiri pangan	19	26
2	% ketersediaan bahan pangan utama	100	94
3	Jumlah lumbung pangan	24	17
4	Tingkat skor PPH (Pola Pangan Harapan)	92	92
5	Tingkat konsumsi protein hewani (gr/kap/th)	4,9	5,45
6	Tingkat konsumsi protein nabati (gr/kap/th)	4.501,77	6.953

Dilihat dari capaian kinerja urusan ketahanan pangan dari enam target indikator RPJMD, sudah empat indikator yang sudah mencapai target sedangkan dua indikator lainnya masih di bawah target RPJMD.

Untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat di desa, Kabupaten Wonosobo rutin melaksanakan program aksi desa mandiri pangan. Jumlah desa mandiri pangan di Kabupaten Wonosobo setiap

tahunnya selalu mengalami peningkatan dan di tahun 2015 ini terdapat 26 desa mandiri pangan yang tersebar di 11 kecamatan atau meningkat sebesar 23,81% dengan penambahan 5 desa mandiri pangan. Melalui desa mandiri pangan ini masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Wonosobo cukup dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di mana pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 3,29%. Namun demikian peningkatan capaian sebesar 3,29% menjadi 94% tersebut belum memenuhi target tahun 2015 sebesar 100%.

Untuk meningkatkan cadangan pangan dan menjamin stabilitas harga pangan di masyarakat, Kabupaten Wonosobo telah mengembangkan lumbung pangan. Pada tahun 2015 telah dibentuk lumbung pangan desa sebanyak 17 yang tersebar di 11 kecamatan dan kondisi ini meningkat 21,43% dibandingkan tahun 2014. Jumlah lumbung pangan ini juga belum memenuhi target tahun 2015 sebesar 24 lumbung pangan sehingga Pemerintah Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat bekerja keras lagi guna mengembangkan lumbung pangan agar dapat mewujudkan cadangan pangan di Kabupaten Wonosobo yang benar-benar kuat.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diukur dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Wonosobo tahun 2015 ditunjukkan dengan meningkatnya skor PPH sebesar 2,11% dari nilai 90,1 di tahun 2014 menjadi 92 di tahun 2015. Di mana skor PPH ini sebagian besar disumbang oleh skor PPH kelompok bahan pangan sayuran dan buah serta padi-padian.

Untuk melihat apakah penduduk Kabupaten Wonosobo telah terpenuhi kebutuhan pangannya secara kuantitatif dapat dilihat dari tingkat konsumsi energi dan protein. Pada tahun 2015 tingkat konsumsi protein hewani sebesar 5,45 gr/kap/th atau meningkat 4,61% dan tingkat konsumsi protein nabati sebesar 6,953 gr/kap/th atau mengalami peningkatan sebesar 58,02%. Angka konsumsi protein nabati lebih tinggi daripada angka konsumsi protein hewani dan angka konsumsi protein ini masih berada di bawah rekomendasi hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) XI tahun 2012 di mana konsumsi protein yang direkomendasikan adalah 57 gr/kap/hari. Data ini secara riil menunjukkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan dan menggambarkan tingkat kecukupan pangan dalam rumah tangga. Perkembangan tingkat konsumsi pangan tersebut juga merefleksikan bahwa tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Wonosobo terhadap pangan masih rendah.

n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sejak bergulirnya reformasi di Indonesia, isu gender secara luas diperbincangkan, bahkan oleh pemerintah telah dimasukkan dalam salah satu indikator pola pembangunan yaitu melalui visi : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Strategi pengarusutamaan gender sesungguhnya telah dicanangkan secara tegas melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Berdasarkan Instruksi tersebut, diharapkan setiap institusi pemerintah untuk memasukkan dimensi keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dan untuk menjabarkannya, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan di Daerah menegaskan keharusan dari setiap daerah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi pengarusutamaan gender.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada Bab III Pasal 4 (ayat 1) secara tegas disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2015, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu :

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	Indek Pembangunan Gender (IPG)	60,50	-
2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	50,5	-
3	% kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	100	100
4	Jumlah Revitalisasi kelembagaan PUG pada 60% Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo sampai tahun 2015	50%	57,5%

Dengan melihat tabel di atas dapat dilihat bahwa angka capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2015 belum dapat ditampilkan karena masih dalam proses penghitungan. Semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dapat tertangani semua atau 100% dapat ditangani, hal tersebut

merupakan bentuk perhatian yang serius terhadap upaya perlindungan kepada perempuan dan anak oleh Pemkab Wonosobo. Selain itu, tertanganinya semua kasus tersebut juga dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tersedianya lembaga dan unit-unit pengaduan korban kekerasan berbasis gender dan anak, dan juga meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta korban sendiri untuk melapor. Sementara itu pencapaian indikator jumlah revitalisasi kelembagaan PUG pada 60% SKPD di Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2015 telah mencapai 23 SKPD atau sebesar 57,5 %, angka ini naik dari tahun sebelumnya yang baru mencapai 14 SKPD atau sebesar 36,85%. Angka capaian tahun 2015 sebesar 57,5% sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 50%. Berhasilnya pencapaian target tersebut disebabkan oleh adanya Juknis Panduan PPRG bagi OPD berupa Peraturan Bupati Nomor 6 baru diterbitkan pada tahun 2014.

o. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai modal dasar pembangunan, sudah sewajarnya jika penduduk menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan kelahiran serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan pengendalian penduduk melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa tanggung jawab Pemerintah kabupaten/kota adalah menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2015, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu :

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	Angka Penurunan TFR (Total Fertility Rate)	2	2,13
2	Angka Penurunan laju pertumbuhan penduduk	0,99	1,27
3	Cakupan unmetneed	5,62	7,93
4	% KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR)	87,25	80,90
5	% Drop out KB	6,88	18,14
6	% Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun %	2	3,26
7	Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Baru	29.774	25.084
8	Rasio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dengan desa/kelurahan	1:2	1:3,90
9	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	795	457
10	% anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	90,25	87,39
11	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terbentuk dan terbina	397	234
12	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang terbentuk dan terbina (Kelompok)	265	262
13	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri	49,08	88,97
14	% Keluarga Pra KS dan KS – I	38,66	42,91
15	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) di setiap kecamatan (unit)	60	67
16	Jumlah Pendidik Sebaya (orang)	300	201
17	Jumlah kasus HIV/AIDS		76

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik. Berkaitan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 adalah 2,13%. Hal ini berarti jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 rata-rata berjumlah 2,13 orang anak. Angka tersebut hampir mencapai target pada tahun 2015 yaitu 2 orang anak.

p. Urusan Perhubungan

Dalam pembangunan suatu daerah, transportasi mempunyai peran yang sangat penting. Bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik namun dalam jangka

panjang peranan transportasi dapat memberikan pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia. Dengan ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna lahan kota dan wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau wilayah.

Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kota dan wilayah. Rencana kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi yang akan terjadi sebagai akibat dari rencana itu sendiri, akan menghasilkan kesemrawutan lalu lintas di kemudian hari. Akibat lebih lanjut adalah meningkatnya jumlah kecelakaan, pelanggaran dan menurunnya sopan santun berlalu lintas, serta meningkatnya pencemaran udara.

Peranan penting transportasi lainnya adalah untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tujuan. Sedangkan wujud transportasi berupa sarana (kendaraan) dan prasarana (jaringan jalan) inilah yang menjadi aspek utama dalam sektor perhubungan yang menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah. Di samping itu, unsur penting dalam urusan perhubungan di wilayah Kabupaten Wonosobo ini adalah lalu lintas dan angkutan jalan darat. Oleh karena itu, urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan pengujian kendaraan bermotor dan layanan kelancaran lalu lintas.

Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Perhubungan pada tahun 2015, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Pembangunan	
		Target	Realisasi
1	Rasio Jumlah Angkutan dengan Penumpang	179,32	180,95
2	% Standar Fasilitas Angkutan Umum	100,00	100
3	Jumlah pengurusan perijinan trayek	726	448
4	Jumlah jalur trayek	36	28
5	Jumlah Uji Kendaraan angkutan umum	2560	4346
6	% Kendaraan Laik Jalan	82	75

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Pembangunan	
		Target	Realisasi
7	Alat Uji yang memenuhi standar	7	5
8	% Jumlah Titik Kemacetan yang diurai/diatasi	100	100
9	% Kawasan parkir yang teratur	90	80,0
10	% Peningkatan Retribusi Pendapatan Parkir	10	96
11	Pemanfaatan/ Optimalisasi Terminal (resmi)	2	2
12	Pemanfaatan Subterminal/ Pangkalan Parkir	8	8

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari dua belas indikator kinerja pembangunan daerah Urusan Perhubungan yang memenuhi target ada enam indikator yaitu rasio jumlah angkutan dengan penumpang, % standar fasilitas angkutan umum, jumlah uji kendaraan angkutan umum, % jumlah titik kemacetan yang diurai/diatasi, pemanfaatan/ optimalisasi terminal (resmi), dan pemanfaatan subterminal/ pangkalan parkir.

Berdasarkan capaian urusan Perhubungan 2015 untuk jumlah uji kendaraan angkutan umum mengalami peningkatan tinggi, hal ini mengindikasikan kegiatan forum LLAJ yang menyasar pada pengelola angkutan berjalan dengan baik.

Dari data elemen urusan perhubungan terlihat trend kenaikan capaian kinerja ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan angkutan barang pada tahun 2015 semakin meningkat, sementara kapasitas jalan tetap hal ini diperlukan rekayasa transportasi agar tidak menambah kemacetan di kemudian hari.

q. **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era saat ini merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya, termasuk juga tentunya dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Menjadi sebuah komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam upaya pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informasi melalui mekanisme yang lebih transparan sesuai amanat UU no. 14 tahun 2008 yakni Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai cara dan keluaran yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi untuk kemajuan dan kesejahteraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan pada Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015, dapat dilihat pada capaian kinerja sebagai indikator kinerja pembangunan yaitu :

Tabel 2.42.
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	Tersedianya media informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah	1 paket	17 paket
2	Tersedianya website pemerintah daerah	*ada (10445 pengunjung)	Ada (60.167 pengunjung)
3	% paket informasi yang terpublikasikan secara langsung maupun melalui media	100	100
4	Jumlah SKPD yang memiliki Sistem Informasi Manajemen	16	16 (16 online)
5	% Ter- <i>Update</i> -nya atribut data spasial	100	100
6	% Jumlah Koneksi WAN ke seluruh Kecamatan	100	93
7	% Terpasangnya VOIP di setiap SKPD	50	2,50

Dari tabel capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi dapat terlihat bahwa realisasi capaian kinerja pada tahun 2015 ini telah memenuhi target. Ketersediaan media informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah berjumlah 17 paket melebihi target 2015 sebesar 1 paket. Pada indikator Jumlah SKPD yang memiliki Sistem Informasi Manajemen juga memenuhi target tahun 2015 sejumlah 16 (on line. Hal ini disebabkan oleh adanya perluasan jaringan WAN dan peningkatan kesadaran SKPD dalam kebutuhan dan keterbukaan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2015 ini terjadi kenaikan pengunjung yang signifikan dari 10.445 pengunjung menjadi 60.167 pengunjung. Hal ini mengindikasikan bahwa daya minat masyarakat untuk memanfaatkan website resmi Pemkab Wonosobo untuk mencari informasi semakin tinggi.

r. Urusan Pertanahan

Pelaksanaan urusan pertanahan di Kabupaten Urusan pertanahan menitik beratkan pada penertiban administrasi pertanahan dan penataan serta penguasaan dan pemilikan tanah serta fasilitasi permasalahan pertanahan. Kewenangan administrasi pertanahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten hanya sebatas memfasilitasi pengelolaan tanah yang menjadi aset Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa. Sedangkan untuk kewenangan pengelolaan administrasi pertanahan masih menjadi

kewenangan pemerintah pusat. Permasalahan bidang pertanahan dari tahun ketahun semakin meningkat baik permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah desa maupun dengan pemerintah daerah dan juga antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi yang menyangkut tanah hak milik masyarakat, tanah kas desa maupun tanah aset pemerintah daerah yang seharusnya segera diselesaikan.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	% lahan yang bersertifikat	35	43,91
2	% Lahan milik Pemerintah yang bersertifikat	27	47,99

Capaian kinerja urusan pertanahan mengalami kemajuan meningkatnya lahan yang bersertifikat menjadi 43,91% yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan percepatan dan pensertifikatan tanah massal melalui PRONA, PRODA, dan SMS.

s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pendayagunaan dan mengoptimalkan seluruh potensi masyarakat. Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Wonosobo diletakkan dalam suatu arah tujuan, yaitu untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat serta meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik dan hukum.

Tanggung jawab masalah keamanan ini tidak hanya terletak pada pemerintah namun juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan kriminalitas menumbuhkan kebijakan untuk senantiasa meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat keamanan (baik Kodim 0707 Wonosobo dan Polres Wonosobo) dan peningkatan kegiatan operasi pengamanan wilayah. Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas sebagai salah satu prioritas pembangunan telah dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kondisi yang kian kondusif

memberikan harapan bagi peningkatan rasa nyaman bagi kehidupan masyarakat untuk dapat menjalankan segenap aktivitasnya dengan baik.

t. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Pengawasan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-undangan.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Pengawasan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	% OPD yang telah menyusun SOP	100	7
2	%SKPD yg menyusun IKU SKPD dan renstra SKPD	100	100
3	Tersedianya pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>	Ada	Ada
4	% kenaikan pendapatan Asli Daerah	25	4
5	% SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.	100	100
6	Jumlah BUMD yang berkinerja baik	5	8
7	% Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100	100
8	% Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kepangkatan	*100	100
9	%Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan kepangkatan	*100	100
10	% Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti (jumlah yg di TL/semua temuan)	*100	71.45

Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Pengawasan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagian besar sudah memenuhi target hanya pada indikator OPD yang telah menyusun SOP masih sangat sedikit yaitu baru 7 OPD dan masih jauh dari target. Demikian juga untuk kenaikan PAD dari tahun 2014 hanya naik 4% sementara targetnya adalah 25%. Sedangkan rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti sebesar 71,45% sementara targetnya 100%.

u. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat yang mandiri, meliputi kemandirian dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Diharapkan masyarakat yang mandiri tersebut secara bertahap dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri pula dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berusaha untuk mengkolaborasikan antara konsep *development* dan *empowerment* dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	% Jumlah BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ	100	100
2	% Kades yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	100	100
3	% Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	90	100
4	% Perangkat desa lainnya yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	70	75
5	% desa yang menyusun profil desa	100	100
6	% jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi keuangan dan aset desa	95	90.67
7	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	236	236
8	Jumlah desa yang menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu	236	236
9	% swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa	50	37.11
10	% penduduk miskin	10	22.08

Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara umum adalah sudah dapat tercapai cukup baik dan sudah melebihi target. Hanya indikator jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi

keuangan serta indikator swadaya masyarakat dalam pembangunan desa capaiannya masih di bawah target.

v. **Urusan Sosial**

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sasaran utama pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disamping itu juga memberdayakan sumber potensi kesejahteraan sosial (PSKS). Pembangunan kesejahteraan sosial bagi PMKS dimaksudkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang akan berdampak pada turunnya angka kemiskinan.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sosial
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	% PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	42	42,84
2	% PMKS mandiri	40	46,35
3	% PMKS terlayani jaminan sosial	52	98,61
4	% Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani	95	100
5	korban bencana yang mendapat pendampingan	700	100
6	Jumlah panti sosial	20	17
7	% Meningkatnya rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM)	95	72,23

Secara umum urusan sosial telah mencapai kinerja yang baik, yaitu dilihat dari prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya sudah melebihi target, demikian pula PMKS mandiri dan terlayani jaminan sosial. Sementara capaian yang masih kurang dari target adalah jumlah panti sosial dan meningkatnya RBM.

w. **Urusan Kebudayaan**

Dalam Pembangunan bidang kebudayaan, Kabupaten Wonosobo memprioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalan nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara khusus pelestarian budaya dan pengenalan akan sejarah telah dikemas dalam rangkaian HUT Kabupaten Wonosobo yang jatuh pada tanggal 24 Juli disajikan berbagai festival kesenian tradisional, gunung, festival balon udara dan prosesi Birat sengkolo, sarasehan pedalangan

dilanjutkan dengan pentas wayang kulit disertai dengan prosesi cukur rambut gembel.

Pemberian ruang bagi penampilan kebudayaan lokal pada event-event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo maupun di tingkat provinsi dan nasional ini memberikan dampak positif bagi tumbuhnya sanggar- sanggar kesenian baru baik sanggar anak maupun remaja.

x. Urusan Statistik

Pembangunan di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi serta mempersiapkan SDM penyelenggaraan statistik. Informasi data statistik yang akurat secara series dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data statistik menjadi parameter bagi pemerintah dalam evaluasi dan perencanaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Statistik
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	Tersedianya data statistik daerah	Ada	ada
2	% validitas data	100,00	100,00

Capaian kinerja pada Urusan Statistik pada tahun 2015 sudah dapat memenuhi target RPJMD secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan capaian dua indikator kinerja Urusan Statistik yang telah memenuhi target.

y. Urusan Kearsipan

Kearsipan mempunyai tujuan untuk menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pengendalian arsip yang berguna dan berhasil guna dengan menciptakan sistem pengendalian masalah yang terkandung didalam arsip. Sistem pengendalian arsip memisahkan arsip atas dasar perbedaaan yang ada yang merupakan dasar untuk penataan arsip secara sistematis dan efektif, agar mempermudah penemuan kembali arsip. Mengingat fungsi arsip sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi, penyusunan pola klasifikasi arsip diarahkan bagi kepentingan petugas arsip dan para pengakses informasi.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	Jumlah SKPD yg melaksanakan akuisisi arsip	40	1 (satu)
2	Jumlah tenaga kearsipan yang memiliki sertifikat kearsipan	13	5 (lima)

Kinerja kearsipan Kabupaten Wonosobo masih sangat lemah, hal ini terlihat dari indikator yang belum mencapai target. jumlah SKPD yang melaksanakan akuisisi arsip pada tahun 2015 ini hanya 1 (satu) orang yang disebabkan oleh belum adanya tenaga arsiparis di masing-masing SKPD dan masih rendahnya kesadaran dari pegawai bahwa arsip merupakan referensi, bukti kegiatan, maupun pilar dalam proses administrasi, serta bukti akuntabilitas kinerja instansi kepada masyarakat, selain itu akibat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja OPD menyebabkan Lembaga Kearsipan Daerah tidak memiliki Depo Arsip yang representatif untuk menampung arsip hasil akuisisi dari OPD sehingga program kegiatan akuisisi sementara ditunda sampai dengan kondisinya memungkinkan. Sementara jumlah tenaga kearsipan di Kabupaten Wonosobo dapat dikategorikan masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah OPD yang ada, yaitu 5 (lima) orang arsiparis yang terdiri dari 4 (empat) orang arsiparis tingkat terampil, dan 1 (satu) orang arsiparis tingkat ahli.

z. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan Kabupaten Wonosobo selain berfungsi sebagai pusat layanan informasi perpustakaan juga melaksanakan kerjasama penyediaan fasilitas untuk kegiatan- kegiatan remaja maupun kelompok sosial seperti penyediaan fasilitas ruangan untuk pertemuan Wonosobo English Club, diskusi dan bedah buku.

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	Jumlah bahan pustaka (BUKU)	95.000	73.710
2	Jumlah perpustakaan :		
	a. Perpustakaan Keliling	4	360
	b. Perpustakaan Daerah	1	1
	c. Perpustakaan Sekolah	400	641
3	jangkauan perpustakaan keliling (desa)	185	68
4	Jumlah pengunjung perpustakaan	510.000	255.842

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
5	Jumlah peminjam buku perpustakaan	100.000	32.040

Capaian kinerja pada Urusan Perpustakaan tahun 2015 secara umum sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Perkembangan perpustakaan pada tahun 2015 sudah melebihi target yang ditetapkan yang meliputi perpustakaan keliling, perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah. Sementara untuk jumlah bahan pustaka, pengunjung dan peminjam masih kurang dari target. Hal ini perlu diperhatikan karena terkait sasaran perluasan akses perpustakaan untuk peningkatan minat dan budaya baca sehingga diharapkan minat baca masyarakat dapat semakin meningkat.

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Urusan Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB karena sector ini merupakan penyedia pangan, penyedia bahan baku industry, penyedia lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani dan pelestarian lingkungan hidup. Namun dari tahu ke tahun kontribusi sector pertanian mengalami penurunan yang disebabkan adanya transformasi struktur ekonomi dari sector primer ke sector sekunder maupun tersier. Sektor pertanian juga sangat erat dengan isu ketahanan pangan. Penduduk yang semakin bertambah dan penurunan produksi tanaman pangan karena alih fungsi lahan akan mengganggu ketersediaan pangan daerah.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	Tanaman pangan (ton)	596.644	461.538
2	Hortikultura (kw)	2.957.380	2.790.570
3	Daging (kg)	6.575.600	9.849.078
4	Telur (kg)	2.950.000	1.398.801
5	Susu (lt)	1.145.220	587.986
6	Populasi sapi (ekor)	36.096	21.262
7	Populasi kambing (ekor)	142.742	156.475
8	Populasi domba (ekor)	92.224	99.293
9	Populasi kerbau (ekor)	4.110	1.043
10	Populasi ayam buras (ekor)	624.578	894.985
11	Populasi ayam petelur (ekor)	29.930	45.945

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
12	Populasi kelinci (ekor)	33.880	38.735
13	Populasi entog (ekor)	46.637	65.026
14	Populasi puyuh (ekor)	192.585	111.780

Kinerja urusan pertanian pada tahun 2015 masih mengalami pelemahan. Masih ada beberapa indikator yang belum memenuhi target. Produksi daging mengalami peningkatan, hal ini disebabkan populasi kambing, domba, ayam dan kelinci meningkat. Produksi telur mengalami penurunan demikian pula produksi susu menurun yang disebabkan menurunnya jumlah populasi ternak perah yang laktasi.

b. Urusan Kehutanan

Sumber daya hutan di Kabupaten Wonosobo terdiri dari kawasan hutan negara seluas ± 20.300 Ha serta hutan rakyat seluas $\pm 19.481.581$ Ha. Hutan yang ada di Wonosobo saat ini menjadi penyangga beberapa kabupaten yang ada dibawahnya, mengingat Wonosobo adalah hulu 3 DAS besar yaitu: Serayu, Luk Ulo dan Bogowonto yang mengalir setidaknya 6 wilayah kabupaten (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo). Sehingga keberadaan hutan di wilayah Kabupaten Wonosobo menjadi sesuatu yang sangat strategis, namun disisi lain pengembangan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat juga tidak boleh dilupakan. Oleh karena itu pengembangan wilayah di luar kawasan hutan/konservasi perlu diikuti dengan penataan fungsi kawasan hutan untuk meningkatkan nilai dan peluang pemanfaatan kawasan hutan untuk menunjang pembangunan yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain adanya kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya memberi peluang pula terjadinya peningkatan pemanfaatan sumberdaya kawasan hutan secara illegal.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kehutanan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	% bahaya kebakaran hutan	0	1,2
2	% luas hutan & lahan kritis yang direhabilitasi thd luas total hutan & lahan kritis	25	12,20

Capaian kinerja pada Urusan Kehutanan tahun 2015 secara umum belummenggembarakan. Masih ada kebakaran hutan 1,2% yang menghanguskan 23,5 hektar di kawasan resor pemangku hutan (RPH)

Sigedang dan RPH Anggrunggondok. Sementara dari 25% luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi baru 12,20%

c. **Urusan Perikanan**

Urusan perikanan yang ada di Kabupaten Wonosobo adalah perikanan darat melalui usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan di perairan darat seperti sungai, danau, rawa, waduk, empang, dan sawah yang digenangi air selama tanaman padi masih muda. Potensi perikanan darat di Kabupaten Wonosobo cukup menjanjikan karena didukung oleh sumberdaya air yang cukup melimpah. Lahan utama pengembangan perikanan di Kabupaten Wonosobo adalah waduk dan kolam rakyat.

Kinerja urusan perikanan di Kabupaten Wonosobo cukup baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya yang semakin meningkat tiap tahunnya dan di tahun 2015 mencapai 9.036 ton, kondisi ini sudah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perikanan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	6.050	9.036

d. **Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Pembangunan bidang energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dalam rangka peningkatan pembangunan pembangkit listrik alternatif non minyak antara lain dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tidak membutuhkan biaya investasi dan operasional yang tinggi selain juga mendukung kelestarian lingkungan hayati. Beberapa sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan adalah energi mikrohidro dan energi biogas.

Mikro hidro sangat sesuai dimanfaatkan di Kabupaten Wonosobo karena topografi wilayahnya yang sebagian besar merupakan daerah perbukitan dengan ketersediaan air permukaan yang cukup banyak. Hal ini dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, air permukaan berupa sungai yang teraliri sepanjang tahun dengan lokasi kemiringan lahan relatif besar maka mempunyai aliran sungai yang banyak terdapat kemiringan, sehingga potensi untuk pembangkit tenaga hidro sangat memungkinkan.

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	% dusun berlistrik	100	100
2	% rumah tangga yg terelektifikasi	100	99,16
3	Rasio penyediaan daya listrik terhadap kebutuhan	109	65,7
4	Jumlah SPBU	8	9
5	Agen LPG	1	5

Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015 secara umum sudah cukup baik. Hingga tahun 2015, semua dusun di wilayah Kabupaten Wonosobo telah terjangkau oleh jaringan listrik. Berdasarkan data dari PLN Kantor Wonosobo, pada tahun 2015 rasio penyediaan daya listrik terhadap kebutuhan adalah sebesar 65,7 meningkat 3,2 dari satu tahun sebelumnya. Artinya meskipun terjadi peningkatan rasio elektrifikasi namun daya listrik yang disediakan PLN masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu masih perlu adanya sumber energi tambahan agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk jumlah SPBU dan agen LPG terdapat 9 SPBU dan 5 unit SPBE di Kabupaten Wonosobo untuk melayani kebutuhan bahan bakar gas baik untuk rumah tangga maupun usaha kecil. Dan kondisi ini sudah melebihi yang ditargetkan. Pada tahun 2015 tidak mengalami penambahan.

e. Urusan Pariwisata

Di Kabupaten Wonosobo, pariwisata merupakan salah satu komoditas andalan. Dengan adanya obyek wisata akan menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu kota tujuan wisata di Jawa Tengah. Potensi pariwisata di Kabupaten Wonosobo sangat prospektif untuk terus dikembangkan khususnya wisata alam yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Wonosobo selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan munculnya destinasi wisata baru. Hal tersebut perlu didukung oleh semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah. Melalui tersedianya sarana prasarana yang memadai, informasi lokasi wisata, akses jalan serta tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga faktor keamanan dan kenyamanan sebagai upaya memberikan pelayanan prima pada wisatawan.

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	Lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara	2,9	2
2	Jumlah penerimaan obyek-obyek wisata (juta)	350	3.056,70
3	Jumlah wisman	86.270	5.056
4	Jumlah wisnu	1.126.191	864.735

f. Urusan Perindustrian

Kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Wonosobo ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah IKM baru sebesar 872 unit yang berasal dari industri pangan, sandang/kulit, kerajinan, kimia/bahan bangunan dan logam/bukan logam. Peningkatan pertumbuhan industri ini disebabkan bertambahnya jumlah industri informal yang diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Di mana sebagian besar IKM yang ada di Kabupaten Wonosobo menggunakan tenaga kerja lokal dan bahan baku lokal.

Dengan bertambahnya IKM baru perlu dikelompokkan dalam sentra-sentra maupun klaster industri sehingga akan terjadi kemitraan yang saling menguntungkan, meningkatkan efisiensi kolektif serta mendorong terciptanya inovasi. Perkembangan IKM ini juga dapat dimanfaatkan dalam rangka perdagangan bebas MEA sehingga akan semakin banyak produk-produk skala ekspor di Kabupaten Wonosobo. Untuk itu perlu dioptimalkan kembali program-program terkait peningkatan daya saing produk sehingga produk-produk Wonosobo menjadi berkualitas dan bisa bersaing di pasar internasional.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	% kandungan bahan baku lokal pada produk IKM	85	100
2	% IKM yang memanfaatkan tenaga kerja lokal	99	100
3	Jenis sentra yang membentuk asosiasi atau sejenisnya	3	3
4	Jumlah usaha industri baru	243	872
5	Jenis usaha industri baru	5	5

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
6	Penetapan industri inti/prioritas	7	1

g. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan di Kabupaten Wonosobo mempunyai peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.

Perdagangan di Kabupaten Wonosobo didukung oleh perdagangan besar dan eceran di pertokoan, warung dan eceran tradisional dengan komoditas utama hasil pertanian dan produk hasil usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti pasar tradisional dan toko modern.

Kinerja urusan perdagangan di Kabupaten Wonosobo ditunjukkan dengan tabel 2.58 di mana dari empat indikator, semuanya belum mencapai target dan menunjukkan perlambatan yang disebabkan antara lain : kurang memadainya sarana prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional apalagi dengan terbakarnya pasar induk Wonosobo tahun 2014 yang mengakibatkan kurang lancarnya distribusi barang, masih banyaknya pelaku perdagangan informal, masih rendahnya daya saing produk ekspor serta belum adanya insentif produk-produk ekspor.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	Jumlah sarana perdagangan	95	82
2	Nilai ekspor (\$)	423.289,53	50.123.595
3	Jumlah negara tujuan	16	12
4	Jumlah komoditas	12	4

h. Urusan Transmigrasi

Kepadatan penduduk Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 mencapai 785 yang berarti 785 jiwa menghuni 1 area wilayah seluas 1 km persegi, sehingga Kabupaten Wonosobo perlu pengirim transmigran. Pembangunan transmigrasi sebagai upaya pemerataan jumlah penduduk dan mengurangi ketimpangan wilayah, mengatasi kemiskinan serta memberikan peluang kesempatan kerja.

Kinerja urusan transmigrasi belum menggembirakan. Hal ini terlihat dari 2 indikator yang belum mencapai target. Jumlah kerjasama antar daerah guna memperoleh lokasi transmigrasi cenderung mengalami penurunan karena kouta yang disediakan pemerintah pusat terbatas yang disebabkan adanya ketidaksiapan lokasi daerah calon penerima transmigran. Hal ini berdampak pada menurunnya jumlah transmigran. Meskipun pendaftar banyak namun kouta terbatas. Sehingga kedepannya pembangunan transmigrasi terus diupayakan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu memberikan fasilitas bagi mobilitas penduduk dan meningkatkan minat masyarakat bertransmigrasi dengan memberikan jaminan bagi calon tansmigran untuk memperoleh tempat tinggal dan penghidupan yang layak.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014

No.	Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi
1	Jumlah kerjasama antar daerah guna memperoleh lokasi transmigrasi (lokasi)	4	2
2	Jumlah calon (KK) Transmigran yang ditempatkan	*18	7

D. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunanyang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Permasalahan daerah haruslah diatasi dengan pendekatan yang tepat agar tidak menghambat laju pembangunan. Pendekatan pemecahan masalah seringkali ditindaklanjuti dengan adanya program pembangunan yang bersifat instan sehingga hanya menjadi program normatif yang tidak efektif dalam pemecahan masalah.

Pemberdayaan potensi dari sumber daya yang ada dalam memecahkan permasalahan menjadi fenomena baru dalam memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan peluang yang belum dimanfaatkan secara baik. Dengan memberdayakan sekecil apapun potensi dan peluang yang ada akan secara langsung dapat mengatasi permasalahan yang terdapat di suatu wilayah. Tentunya hal ini tidak serta merta secara instan dapat dirasakan hasilnya, tetapi akan berkesinambungan dan berkelanjutan manfaat yang dapat dirasakan.

Adapun permasalahan daerah yang dihadapi pada proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

3. Masih rendahnya layanan infrastruktur wilayah
4. Belum optimalnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan
5. Masih terjadinya ketimpangan antar wilayah dan kesejahteraan
6. Sektor pertanian sebagai basis perekonomian belum mampu mensejahterakan masyarakat
7. Terjadinya Degradasi kualitas lingkungan hidup akibat bencana alam maupun aktivitas manusia
8. Belum maksimalnya penyelenggaraan trantibum dan linmas

E. Isu Strategis

Mendasarkan pada evaluasi capaian RPJMD 2010-2015 dan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik,
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan,
3. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan, pemerataan dan daya saing daerah,
4. Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan,
5. Peningkatan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran,
6. Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim,
8. Penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi,